

LAPORAN AKUTABILITAS KINERJA



SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN BANGKA BARAT
TAHUN 2020

PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN BANGKA BARAT
TAHUN 2021

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT Tuhan Yang Maha Kuasa, atas rahmat dan perkenan-Nya penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Sekretariat Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2020 dapat diselesaikan.

Laporan Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2020 ini merupakan laporan atas prestasi kerja berdasarkan penggunaan anggaran Tahun 2020 berdasarkan Perjanjian Kinerja sebagaimana yang diamanatkan oleh Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sesuai dengan tujuan dan sasaran kinerja yang tertuang dalam Renstra Sekretariat Daerah Tahun 2016-2021 untuk masa Tahun 2020.

Semoga Laporan Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2020 ini dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang membutuhkan, baik sebagai informasi, evaluasi maupun parameter dalam meningkatkan kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Bangka Barat, sehingga masyarakat Kabupaten Bangka Barat dapat merasakan manfaat yang lebih luas dari peningkatan kinerja Pemerintahan Daerah.

Kami menyadari masih banyak kekurangan dalam penyusunan laporan ini untuk itu kritik dan saran yang bersifat membangun sangat kami harapkan demi penyempurnaan penyusunan laporan dan perbaikan kinerja di masa yang akan datang.

Akhir kata kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berpartisipasi langsung maupun tidak langsung dalam menyusun LAKIP ini. Semoga Allah SWT selalu meridhoi segala upaya kita dalam mengabdikan bagi kepentingan masyarakat, bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang tercinta ini.

Muntok, Februari 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA BARAT,



Drs. MUHAMMAD SOLEH, M.AP
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19680810 198810 1 002

RINGKASAN EKSEKUTIF

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah bahwa setiap instansi pemerintah wajib mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik setiap akhir anggaran melalui suatu pelaporan yang disebut Laporan Kinerja.

Laporan Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2020 merupakan laporan tahun ke 5 (lima) dari pelaksanaan Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Bangka Barat periode 2016-2021 yang menyajikan pengukuran, analisa dan evaluasi atas pencapaian sasaran strategis pembangunan sebagaimana yang telah diperjanjikan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2020.

Pengukuran capaian kinerja dilakukan dengan menggunakan metode perbandingan capaian indikator kinerja sasaran dengan target indikator kinerja sasaran yang telah ditetapkan. Metode perbandingan capaian kinerja sasaran tersebut dilakukan antara rencana dengan realisasi kinerja yang selanjutnya dilakukan analisis terhadap penyebab terjadinya celah kinerja antara target dan realisasi.

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap sasaran strategis Sekretariat Daerah yang tertuang dalam dokumen perjanjian kinerja Tahun 2020, dari 4 (empat) Sasaran Indikator Kinerja Utama (IKU) yang dijabarkan kedalam 8 (delapan) Indikator Sasaran, terdapat 2 (dua) indikator yang mencapai target yang ditetapkan. Dari 5 (lima) sasaran Sekretariat Daerah yang dijabarkan kedalam 10 (sepuluh) indikator sasaran terdapat 3 (tiga) indikator sasaran yang tercapai dan 7 (tujuh) indikator sasaran tidak tercapai.

Berdasarkan evaluasi capaian sasaran Tahun 2020 terhadap target akhir Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2016-2021, dari 10 indikator sasaran, sebanyak 3 (tiga) indikator sasaran yang telah tercapai dan 4 (empat) indikator sasaran belum tercapai namun optimis tercapai pada akhir periode Renstra serta 3 (tiga) indikator sasaran belum tercapai dan perlu upaya lebih untuk mencapai target akhir periode Renstra.

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
RINGKASAN EKSEKUTIF.....	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	I-1
1.1. Latar Belakang.....	I-1
1.2. Maksud dan Tujuan	I-1
1.3. Dasar Hukum.....	I-2
1.4. Gambaran Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Bangka Barat	I-4
1.5. Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi.....	I-7
1.6. Isu Strategis Organisasi	I-7
1.7. Sistematika Penyusunan.....	I-7
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	II-1
2.1. Rencana Strategis 2016-2021	II-1
2.1.1. Visi, Misi, Tujuan Dan Sasaran	II-1
2.1.1.1 Visi	II-1
2.1.1.2 Misi	II-1
2.1.1.3 Tujuan	II-2
2.1.1.4 Sasaran	II-3
2.2. Keterkaitan Tujuan, Sasaran Dan Indikator Kinerja.....	II-3
2.3. Indikator Kinerja Utama (IKU)	II-7
2.4. Strategi dan Arah Kebijakan	II-7
2.5. Perjanjian Kinerja Tahun 2020	II-17
2.6. Program untuk Pencapaian Sasaran.....	II-17
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	III-1
3.1. Kerangka Pengukuran Kinerja.....	III-1
3.2. Capaian Sasaran Renstra Tahun 2020.....	III-3
3.2.1 Sasaran Strategis 1 “Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Sekretariat Daerah”	III-5
3.2.2 Sasaran Strategis 2 “Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Pemerintahan”	III-10

3.2.3 Sasaran Strategis “Meningkatnya Kualitas Kinerja Pemerintah Daerah”	III-12
3.2.4 Sasaran Strategis “Terpenuhinya Kualitas Tatalaksana Dan Pelayanan Publik Pemerintah Daerah”	III-18
3.2.5 Sasaran Strategis “Tersedianya Regulasi Daerah Yang Memadai”	III-27
3.3. Capaian Perjanjian Kinerja Eselon II b, III dan IV Tahun 2020.....	III-29
3.4. Capaian Tujuan Sekretariat Daerah Tahun 2020.....	III-44
3.5. Realisasi Anggaran.....	III-44
3.6. Analisis Atas Efisiensi Dalam Penggunaan Sumberdaya.....	III-47
 BAB IV PENUTUP	 IV-1

LAMPIRAN:

1. Surat Keputusan IKU Sekretariat Daerah Tahun 2016-2021
2. Indikator Kinerja Utama Sekretariat Daerah Tahun 2016-2021
3. Perjanjian Kinerja Sekretaris Daerah Tahun 2020 (induk dan perubahan)

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Terselenggaranya pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa (*good governance and clean government*) merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan serta cita-cita berbangsa dan bernegara, sehingga diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan *legitimate* agar penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Hal tersebut sejalan dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Selanjutnya dalam pasal 58 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dinyatakan bahwa dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah berpedoman pada azas penyelenggaraan negara yang terdiri atas asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggara negara, asas kepentingan umum, asas keterbukaan, asas proporsionalitas, asas profesionalitas, asas akuntabilitas, asas efisiensi, azas efektifitas dan azas keadilan. Menurut penjelasan Undang-undang tersebut, asas akuntabilitas adalah azas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggung-jawabkan kepada masyarakat dan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2020 dilaksanakan berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Ini merupakan bagian dari implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah guna mendorong terwujudnya Kepemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa (*Good Governance and Clean Government*).

1.2. Maksud Dan Tujuan

Maksud penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Sekretariat Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2020 adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah selama kurun waktu 1 (satu) tahun dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi. Penyusunan

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah menjadi alat kendali untuk mendorong peningkatan kinerja setiap unit organisasi.

Tujuan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Sekretariat Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai;
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Sekretariat Daerah untuk meningkatkan kinerjanya.

1.3. Dasar Hukum

Dasar hukum Penyusunan Laporan Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5675);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
10. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
12. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kewenangan Kabupaten Bangka Barat;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2016 Nomor 2 Seri D),sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 10 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Barat(Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2016 Nomor 2 Seri D);
17. Peraturan Bupati Bangka Barat Nomor 16 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan, Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah;
18. Peraturan Bupati Bangka Barat Nomor 79 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Bangka Barat Nomor 39 Tahun 2017 tentang Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2016-2021 (Berita Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 50 Seri E).

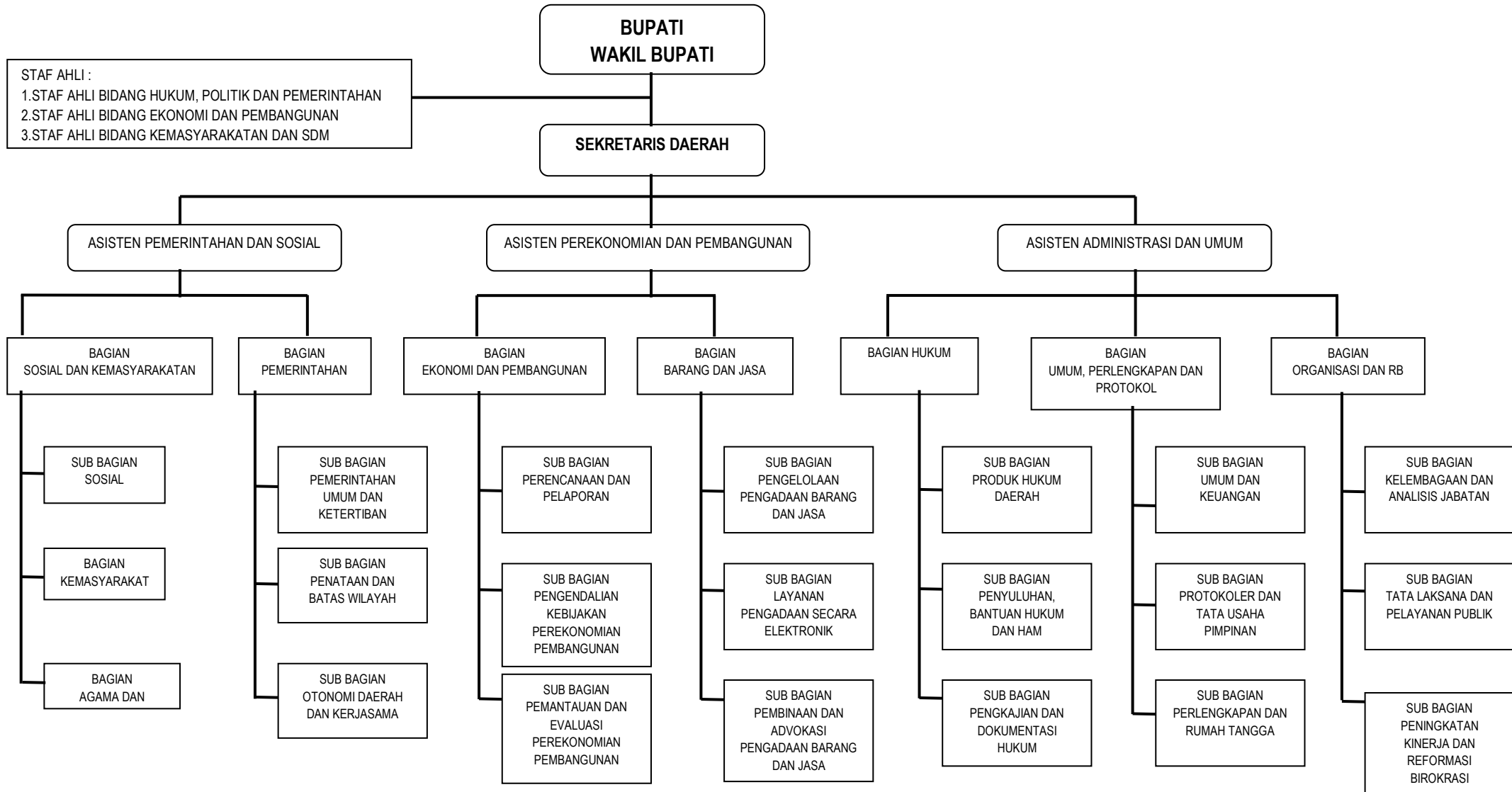
1.4. Gambaran Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Bangka Barat

Berdasarkan Peraturan Bupati Bangka Barat Nomor 16 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan, Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah, Susunan Organisasi Sekretariat Daerah terdiri atas :

- a. Sekretaris Daerah;
- b. Asisten Sekretaris Daerah, terdiri dari:
 1. Asisten Pemerintahan dan Sosial;
 2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan;
 3. Asisten Administrasi dan Umum.
- c. Staf Ahli Bupati, terdiri dari:
 1. Staf Ahli Bidang Hukum, Politik dan Pemerintahan;
 2. Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Pembangunan;
 3. Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan SDM.
- d. Bagian, terdiri dari:
 1. Bagian Sosial dan Kemasyarakatan, terdiri dari:
 - a. Sub Bagian Sosial;
 - b. Sub Bagian Kemasyarakatan;
 - c. Sub Bagian Agama dan Kebudayaan.
 2. Bagian Pemerintahan, terdiri dari:
 - a. Sub Bagian Pemerintahan Umum dan Ketertiban;
 - b. Sub Bagian Penataan dan Batas Wilayah;
 - c. Sub Bagian Otonomi Daerah dan Kerja sama.
 3. Bagian Perekonomian dan Pembangunan, terdiri dari:
 - a. Sub Bagian Pemantauan dan Evaluasi Kebijakan Perekonomian dan Pembangunan;
 - b. Sub Bagian Pengendalian Kebijakan Perekonomian dan Pembangunan;
 - c. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan.
 4. Bagian Pengadaan Barang dan Jasa, terdiri dari:
 - a. Sub Bagian Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa;
 - b. Sub Bagian Layanan Pengadaan Secara Elektronik;
 - c. Sub Bagian Pembinaan dan Advokasi Barang/jasa.
 5. Bagian Hukum, terdiri dari:
 - a. Sub Bagian Produk Hukum Daerah;
 - b. Sub Bagian Penyuluhan, Bantuan Hukum dan HAM;
 - c. Sub Bagian Pengkajian dan Dokumentasi Hukum.

6. Bagian Umum, Perlengkapan dan Protokol
 - a. Bagian Umum dan Rumah Tangga;
 - b. Sub Bagian Protokol dan Tata Usaha Pimpinan;
 - c. Sub Bagian Perlengkapan dan Keuangan.
7. Bagian Organisasi dan Reformasi Birokrasi
 - a. Sub Bagian Kelembagaan dan Analisis Jabatan;
 - b. Sub Bagian Tata Laksana dan Pelayanan Publik;
 - c. Sub Bagian Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi.

STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BANGKA BARAT



1.5. Tugas Pokok Dan Fungsi Sekretariat Daerah

Tugas pokok dan fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Bangka Barat tertuang dalam Peraturan Bupati Bangka Barat No. 19 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan, Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah, yaitu : membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif.

Adapun fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Bangka Barat adalah menyelenggarakan fungsi :

- a. pengoordinasian penyusunan kebijakan Daerah;
- b. pengoordinasian pelaksanaan tugas Organisasi Perangkat Daerah;
- c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah;
- d. pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara pada instansi Daerah

1.6. Isu Strategis Sekretariat Daerah

Permasalahan utama (*strategic Issued*) yang dihadapi Sekretariat Daerah Kabupaten Bangka Barat, yaitu :

1. Belum optimalnya koordinasi antara Seretariat Daerah dengan Perangkat Daerah terkait tugas dan pokok asisten sekretariat daerah;
2. Belum optimalnya koordinasi antar bagian-bagian lingkup Sekretariat Daerah;
3. Kapasitas SDM terkait perencanaan belum memadai.
4. Belum digunakannya aplikasi dalam proses perencanaan kinerja, pengukuran kinerja dan pelaporan kinerja;
5. Belum optimalnya pelaksanaan Sistem Pengawasan Internal;
6. Belum optimalnya penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

1.7. Sistematika Penyusunan

Sistematika Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Sekretariat Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2020 terdiri dari 4 (empat) Bab sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan tentang latar belakang, maksud dan tujuan penyusunan lakip, gambaran umum organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi, isu strategis Organisasi , dan sistematika penyusunan.

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Bab ini menguraikan tentang Rencana Strategis Sekretariat Daerah yang terdiri dari keterkaitan antara visi, misi, tujuan, sasaran strategis Kepala Daerah dan

organisasi, keterkaitan tujuan, sasaran indikator kinerja Sekretariat Daerah Tahun 2016-2021, IKU sekretariat Daerah, Strategi dan Arah kebijakan, Perjanjian Kinerja dan Program untuk pencapaian Sasaran.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2020

Bab ini menguraikan tentang pengukuran Pencapaian Kinerja Tahun 2020, evaluasi dan analisa pencapaian sasaran kinerja strategis, analisis atas pencapaian keuangan Tahun 2020 dan analisis atas efisiensi penggunaan sumberdaya.

BAB IV PENUTUP

Memuat kesimpulan umum dari pencapaian kinerja tiap sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Laporan Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2020 dan saran yang dibutuhkan untuk perbaikan kinerja instansi pemerintah pada masa mendatang.

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

2.1. Rencana Strategis 2016-2021

Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Daerah Kabupaten Bangka Barat adalah dokumen perencanaan yang menentukan arah kebijakan dan sasaran kegiatan organisasi untuk periode 2016-2021. Rencana Strategis Sekretariat Daerah Tahun 2016-2021 menjadi penting karena dalam masa tersebut Perangkat Daerah berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan kinerjanya sesuai dengan dokumen perencanaan ini. Selain itu orientasi penyusunan Renstra ini antara lain, adalah :

1. Menjadi acuan penyusunan Rencana Kerja Tahunan.
2. Dasar penilaian (evaluasi) kinerja instansi.
3. Penjabaran Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran KDH/WKDH dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.
4. Menjadi acuan dalam penyusunan LAKIP Perangkat Daerah.

2.1.1 Visi, Misi, Tujuan Dan Sasaran

2.1.1.1. Visi

Visi adalah rumusan umum mengenai cita-cita yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Visi Kepala Daerah periode 2016-2021 adalah: “ **Menuju Kabupaten Bangka Barat Hebat 2021** ” *Hebat (Harmonis, Enerjik, Berperestasi, Amanah dan Taqwa).*

Pernyataan visi tersebut mengandung makna yaitu: “Kabupaten Bangka Barat yang memiliki tata kelola pemerintahan yang baik, daya saing daerah yang tinggi, masyarakat yang berkualitas dan pembangunan yang berkesinambungan dengan lingkungan hidup yang lestari”

2.1.1.2. Misi

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Pernyataan misi secara prinsip merupakan penjabaran, turun anda penerjemahan atau perincian secara lebih terfokus dari visi yang telah ditetapkan.

Misi- Misi Pembangunan Kabupaten Bangka Barat Tahun 2016-2021 adalah;

- a. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel untuk pelayanan publik yang berkualitas;
- b. Membangun perekonomian yang berbasis sumber daya lokal dan berdaya saing tinggi;

- c. Membangun masyarakat yang maju dan berkualitas;
- d. Mewujudkan kelestarian lingkungan untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan;

2.1.1.3. Tujuan

Sebagaimana telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa Renstra perangkat daerah tidak lagi memuat rumusan visi dan misi perangkat daerah, maka tujuan jangka menengah perangkat daerah dirumuskan berdasarkan;

- a. Visi dan Misi Kepala Daerah yang sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah;
- b. Hasil identifikasi isu-isu strategis,
- c. Penyelarasan dengan tujuan dari Renstra Kementerian/Lembaga.

Tujuan merupakan implementasi dari pernyataan misi yang hendak dicapai dalam jangka waktu 5 tahun. Untuk mencapai misi Kepala Daerah yang sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat Daerah, tujuan yang hendak dicapai adalah sebagaimana ditampilkan pada Tabel 2.1:

Tabel 2.1
Penterjemahan Misi Kepala Daerah ke dalam Tujuan Sekretariat Daerah

Misi Kepala Daerah	Tujuan Sekretariat
Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel untuk Pelayanan Publik yang berkualitas	1) Meningkatkan akuntabilitas kinerja Sekretariat Daerah. 2) Meningkatkan sistem tata kelola pemerintahan yang efektif.

Adapun Indikator dan Target Tujuan Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2
Indikator dan Target Tujuan Sekretariat Daerah

Tujuan	Indikator	Target
Meningkatkan akuntabilitas kinerja Sekretariat Daerah.	Nilai evaluasi SAKIP Sekretariat Daerah	72,5
Meningkatkan sistem tata kelola pemerintahan yang efektif.	1. Nilai LPPD Pemerintah Daerah	3.80
	2. Survey kepuasan Masyarakat (SKM) atas pelayanan publik	83

2.1.1.4. Sasaran

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai dalam jangka pendek. Untuk mencapai tujuan di atas, maka ditetapkan sasaran yang akan dicapai sebagai berikut :

Tabel 2.3.
Keterkaitan Tujuan dan Sasaran Pembangunan Sekretariat Daerah Kab. Bangka Barat
Tahun 2016-2021

Tujuan	Sasaran
1. Memperkuat akuntabilitas kinerja Sekretariat Daerah	1. Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Sekretariat Daerah
2. Meningkatkan sistem tata kelola pemerintahan yang efektif	1. Meningkatkan kualitas pelaksanaan pemerintahan
	2. Meningkatkan kualitas kinerja pemerintah daerah
	3. Terpenuhinya kualitas tatalaksana dan pelayanan publik pemerintah daerah
	4. Tersedianya regulasi daerah yang memadai

2.2. Keterkaitan Tujuan, Sasaran Dan Indikator Kinerja

Selanjutnya untuk mengukur ketercapaian dari tujuan dan sasaran strategis tersebut disusunlah suatu indikator kinerja, sehingga pencapaian atas kinerja sasaran dapat diukur setiap tahun.

Keterkaitan Tujuan, Sasaran dan Indikator kinerja dan Target Kinerja ditampilkan pada Tabel 2.4.

Tabel. 2.4. Keterkaitan Tujuan, Sasaran, Indikator Kinerja dan Target Kinerja Tahunan Sekretariat Daerah Tahun 2016-2021

Tujuan	Indikator Tujuan	Target	Sasaran	Indikator Sasaran	Rumus	Keterangan	Target				
							2017	2018	2019	2020	2021
1. Memperkuat akuntabilitas kinerja Sekretariat Daerah	Nilai evaluasi SAKIP Sekretariat Daerah	73	1. Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Sekretariat Daerah	1. Nilai evaluasi SAKIP Sekretariat Daerah	Nilai Evaluasi SAKIP dari hasil penilaian Kemenpan/Inspektorat	Bukan Indikator Kinerja Utama	60	62	70	72,5	73
				2. Persentase Temuan Hasil Pemeriksaan yang ditindaklanjuti	Jumlah Temuan Hasil Pemeriksaan yang ditindaklanjuti [dibagi] Jumlah seluruh Temuan Hasil Pemeriksaan [dikali] 100	Bukan Indikator Kinerja Utama	100%	100%	100%	100%	100%
2. Meningkatkan sistem tata kelola pemerintahan yang efektif	1. Nilai LPPD Pemerintah Daerah	3.80	1. Meningkatkan kualitas pelaksanaan pemerintahan	1. Nilai LPPD Pemerintah Daerah	Nilai LPPD dari hasil penilaian BPKP	Indikator Kinerja Utama	3.60	3.75	3.80	3.80	3.80
			2. Meningkatkan kualitas kinerja pemerintah daerah	1. Persentase capaian kinerja pemerintah daerah	Jumlah capaian realisasi fisik kegiatan PD [dibagi] total rencana capaian fisik kegiatan PD [dikali] 100	Indikator Kinerja Utama	100%	100%	100%	100%	100%

				2. Persentase penyerapan anggaran pemerintah daerah	Jumlah capaian realisasi keuangan kegiatan PD [dibagi] total rencana capaian realisasi keuangan kegiatan PD [dikali] 100	Indikator Kinerja Utama	90%	92%	93%	94%	95%
				3. Persentase paket pengadaan yang dilaksanakan	Jumlah Paket Pengadaan yang dilaksanakan [dibagi] Total Paket Pengadaan yang disampaikan [dikali] 100	Indikator Kinerja Utama	100%	100%	100%	100%	100%
3. Meningkatkan sistem tata kelola pemerintahan yang efektif	2. Survey kepuasan masyarakat (SKM) atas pelayanan publik	85	3. Terpenuhinya kualitas tatalaksana dan pelayanan publik pemerintah daerah	1. Survey kepuasan masyarakat (SKM) atas pelayanan publik	Nilai Rata-Rata Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) atas pelayanan publik yang dilaksanakan di Kabupaten	Indikator Kinerja Utama	80	81	82	83	85

					Bangka Barat						
				2. Persentase perangkat daerah yang tatalaksananya baik	Jumlah OPD yang tatalaksananya baik [dibagi] jumlah keseluruhan OPD [dikali] 100	Indikator Kinerja Utama	75%	80%	85%	90%	95%
				3. Nilai Evaluasi Kinerja BUMD	Nilai kinerja BUMD dari hasil pemeriksaan dan evaluasi BPKP	Indikator Kinerja Utama	58,00	58.41	58.50	59.00	59.50
			5. Tersedianya regulasi daerah yang memadai	1. Persentase regulasi daerah yang ditetapkan sesuai dengan amanat peraturan di atasnya	jumlah peraturan yang diterbitkan [dibagi] jumlah keseluruhan rancangan peraturan yang diusulkan [dikali] 100	Indikator Kinerja Utama	100%	100%	100%	100%	100%

2.3. Indikator Kinerja Utama (Iku)

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik, telah diterbitkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah.

Sekretariat Kabupaten Bangka Barat telah menetapkan Indikator Kinerja Utama melalui Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kab. Bangka Barat Nomor: 188.4/ 009 /4.1.3.1/ 2019 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Sekretariat Daerah Tahun 2016-2021. Adapun penetapan Indikator Kinerja Utama Sekretariat Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2020 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.5.
Target Indikator Kinerja Utama Sekretariat Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2020

No.	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target
1.	Meningkatnya kualitas pelaksanaan pemerintahan	Nilai LPPD Pemerintah Daerah	Nilai	3.8
2.	Meningkatnya kualitas kinerja pemerintah daerah	1. Persentase capaian kinerja pemerintah daerah	Persen	100
		2. Persentase penyerapan anggaran pemerintah daerah	Persen	94
		3. Persentase paket pengadaan yang dilaksanakan	Persen	100
3.	Terpenuhinya kualitas tatalaksana dan pelayanan publik pemerintah daerah	1. Survey kepuasan masyarakat (SKM) atas pelayanan publik	Nilai	83
		2. Persentase perangkat daerah yang tatalaksananya baik	Persen	90
		3. Nilai Evaluasi Kinerja BUMD	Nilai	59
4.	Tersedianya regulasi daerah yang memadai	Persentase regulasi daerah yang ditetapkan sesuai dengan amanat peraturan di atasnya	Persen	100

2.4. Strategi Dan Arah Kebijakan

Strategi dan Arah kebijakan dalam rencana strategis perangkat daerah adalah strategi dan kebijakan perangkat daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah perangkat daerah yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah secara efektif dan efisien. Strategi dan kebijakan jangka menengah perangkat daerah menunjukkan bagaimana cara perangkat daerah mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah perangkat

daerah serta target kinerja yang berorientasi hasil pada program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi perangkat daerah.

Strategi dan kebijakan dalam rencana strategis perangkat daerah selanjutnya menjadi dasar perumusan kegiatan bagi setiap program prioritas dalam RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi perangkat daerah. Rumusan strategi merupakan pernyataan-pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai serta selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian kebijakan. Rumusan strategi juga harus menunjukkan keinginan yang kuat bagaimana perangkat daerah menciptakan nilai tambah (*value added*) bagi *stakeholder* layanan. Secara teknis strategi harus dikendalikan dan dievaluasi (*learning process*).

Setelah merumuskan strategi yang akan dilakukan dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan perangkat daerah, agar lebih terarah dalam perencanaan disusunlah rumusan kebijakan guna memperjelas strategi sehingga lebih spesifik/fokus, konkrit, dan operasional. Beberapa pertimbangan yang digunakan dalam merumuskan kebijakan antara lain :

- a. Mengukur besarnya pengaruh kebijakan terhadap keberhasilan implementasi strategi;
- b. Keterkaitan langsung dengan capaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan; serta
- c. Menguji kebijakan yang ada dapat menghasilkan pemilahan kegiatan bagi program prioritas berdasarkan tugas dan fungsi perangkat daerah agar lebih tepat dan rasional serta telah mempertimbangkan faktor-faktor penentu keberhasilan untuk mencapai sasaran.

Pemetaan Tujuan, Strategi dan Arah Kebijakan serta Program selama 5 (lima) tahun Sekretariat Daerah Kab. Bangka Barat ditampilkan pada Tabel 2.6.

Tabel 2.6 Pemetaan Tujuan, Sasaran, Strategi Dan Arah Kebijakan

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran / Indikator Tujuan	Target						Strategi	Arah Kebijakan						Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD		
			2016	2017	2018	2019	2020	2021				2016	2017	2018	2019				2020	2021	2016	2017	2018	2019		2020	2021
Menguatkan akuntabilitas kinerja Sekretariat Daerah		1.Nilai evaluasi SAKIP Sekretariat Daerah	60	60	62	70	72,5	73	Penerapan perencanaan pembangunan Setda yang berkualitas	Meningkatkan Kualitas SDM Perencanaan Setda			√	√	√	√	√										
	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Sekretariat Daerah	2. Nilai Evaluasi SAKIP Sekretariat Daerah	60	60	62	70	72,5	73	Peningkatan akuntabilitas pengelolaan keuangan Setda	Meningkatkan Kualitas Dokumen Perencanaan			√	√	√	√	√	1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pemenuhan layanan administrasi perkantoran	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
									Optimalisasi Pengendalian dan Evaluasi pada perencanaan Setda	Meningkatkan Kualitas Dokumen Pelaporan			√	√	√	√	√	2. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Status Capaian Kinerja Keuangan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

																	n										
										pelaksana an pengendal ian dan evaluasi dokumen perencana an secara berkala		√	√	√	√	√	3. Program Peningk atan Sarana dan Prasaran a Aparatur	Persentas e sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	100.00 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100%
																	4. Program Peningk atan Kapasita s Sumber Daya Aparatur	Optimali sasi sumberda ya aparatur dalam bekerja	N/A	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100%
																	5. Program Peningk atan Disiplin Aparatur	Optimaln ya Disiplin Aparatur	100.00 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100%
Menin gkatka n sistem tata kelola pemer intahan yang efektif		1. Nilai LPPD Pemerinta h Daerah	3.6	3.6	3.75	3.8	3.8	3.8	Penyelen ggaraan Pemerint ah Daerah yang bersih, transpara n, akuntable dan inovatif	Penataan Penyeleng garaan Pemerinta h Daerah	√	√	√	√	√	√											

									Peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan	Mengkoordinasi sekaligus mengevaluasi pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan	√	√	√	√	√	√										
									Peningkatan kinerja Kecamatan dalam pelaksanaan pembangunan	Mengkoordinasikan kinerja dalam penyelenggaraan tugas umum	√	√	√	√	√	√										
	1. Meningkatkan kualitas pelaksanaan pemerintahan	1. Nilai LPPD Pemerintah Daerah	3.6	3.6	3.75	3.8	3.8	3.8	Optimalisasi penyelenggaraan kerjasama daerah dalam peningkatan kualitas pelayanan publik di daerah berdasarkan MOU yang sudah ada	Penguatan Kerja Sama Pembangunan Daerah	√	√	√	√	√	√	1. Program Penguatan dan Penataan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Integritas Pelayanan Publik	100%	100%	6.5	6.5	6.5	7	7	7

										Monitorin g efektifitas pelaksana an MOU secara berkala	√	√	√	√	√	√																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	---	---	---	---	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

																	an Beraga ma	n Beragam a								
																	6. Program Kerjasa ma Pemb ngun	Terjalinn ya kerjasam a pembang unan antar daerah	5	5 mou	5 mou	5 mou	5 mo u	5 mo u	5 mou	25 Mou
																	7. Program Penetap an dan Penegas an Batas Wilayah	Terciptan ya tertib batas antar desa/kelu rahan di Kabupate n Bangka Barat	100%	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100%
																	8. Program Penataa n Wilayah dan Kelemb agaan	Terfasilit asinya penataanl embaga desa/kelu rahan	100%	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100%
	2. Menin gkatny a kualita s kinerja pemerit ah daerah	1. Persentase capaian kinerja pemerintah daerah		100%	100%	100%	100%	100%	Optimali sasi Pelaksan aan Pembang unan Daerah Daerah	Inventaria sai Program / Kegiatan Perangkat Daerah	√	√	√	√	√	√	1. Program Pengemb angan Kebijak an Perekon omian Pemb ngun	Pengemb angan Kebijaka n Pembang unan Sesuai Dengan Perencan aan	100%	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100%

		2. Persentase penyerapan anggaran pemerintah daerah		90%	92%	93%	94%	95%		Monitorig dan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Program / Kegiatan Perangkat Daerah	√	√	√	√	√	√	2. Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	Cakupan Perangkat Daerah yang menggunakan media sosial sebagai sarana interaksi pemerintah dan masyarakat	47%	78 %	78.0 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100%
		3. Persentase paket pengadaan yang dilaksanakan		100%	100%	100%	100%	100%	Optimalisasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	Identifikasi Paket Pengadaan	√	√	√	√	√	√	3. Program Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Secara Elektronik	Penggunaan e-procurement terhadap belanja pengadaan	100%	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100.0 %	100.0 %
										Penyelenggaraan Pengadaan Barang/Jasa secara Transparan, Cepat, Tepat dan Akuntabel	√	√	√	√	√	√	4. Program Sarana Informasi Pembangunan Daerah	Terciptanya Dokumentasi Pembangunan Daerah sebagai Sarana Informasi	49%	51 %	51 %	53%	55 %	57 %	59%	100%
										Pembinaan SDM Pengadaan Barang/Jasa	√	√	√	√	√	√	5. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Masa	Peningkatan masyarakat yang memanfaatkan informasi melalui media online	N/A	96 %	96 %	96%	96 %	0	0	100%

																	6. Program Kerjasama Informasi dengan Mass Media	Tersebar nya informasi publik secara efektif	N/A	50 %	50 %	60%	70 %	0	0	100%
	3. Terpe nuhiny a kualita s tatalak sana dan pelaya nan publik pemeritah daerah	1. Survey kepuasan masyarakat (SKM) atas pelayanan publik		80	81	82	83	85	Melakuk an pendataa n capaian SPM pada pelayana n dasar sebagai baseline	Penyusun an basis data terkait pelayanan dasar			√	√			1. Program Penataa n dan Penguat an Kelemb agaan	Persentas e Perangka t Daerah yang tepat fungsi	N/A	16 %	16 %	31%	47 %	63 %	78%	78%
									Penguata n kelembag aan sesuai dengan kebutuha n dengan berpedo man pada peraturan perundan g- undangan	Penguatan ketatalaks anaan lembaga	√	√	√	√	√	√	2. Program Peningk atan Kualitas Pelayan an Publik	Nilai sistem pelayana n publik	79	81	81	82	83	84	85	85
		2. Persentase perangkat daerah yang tatalaksan any baik		75%	80%	85%	90%	95%	Peningka tan koordina si penyelen ggaraan pelayana n dasar	Monitorin g dan evaluasi pencapaia n SPM pada pelayana n dasar secara			√	√	√	√										

										berkala																
									Perbaikan Sistem Pelayanan Publik	Monitoring sistem pelayanan publik secara berkala	√	√	√	√	√	√	4. Program Penataan dan Penguatan Ketatalaksanaan	Persentase Perangkat Daerah yang ketatalaksanaanya dengan kriteria "BAIK"	10.3%	37.5%	37.5%	47%	53%	59.4%	65.6%	65.6%
		3. Nilai Evaluasi Kinerja BUMD		58,00	58.41	58.5	59	59.5	Optimalisasi Penataan BUMD	Pembinaan, monitoring dan Evaluasi terhadap penyelenggaraan BUMD	√	√	√	√	√	√	5. Program Pembinaan BUMD	Terbinanya BUMD	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	4. Tersedianya regulasi daerah yang memadai	Persentase regulasi daerah yang ditetapkan sesuai dengan amanat peraturan di atasnya		100%	100%	100%	100%	100%	Optimalisasi Penyusunan Regulasi Daerah Sesuai dengan amanat peraturan di atasnya	Identifikasi Kebutuhan Produk Hukum Daerah	√	√	√	√	√	√	1. Program Penataan Peraturan Perundang-undangan	Cakupan rancangan regulasi daerah menjadi regulasi daerah	73%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
										Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	√	√	√	√	√	√										
										Fasilitasi Bantuan Hukum	√	√	√	√	√	√										
										Penyebarluasan Produk Hukum Daerah	√	√	√	√	√	√										

2.5. Perjanjian Kinerja Tahun 2020

Tujuan Perjanjian Kinerja antara lain adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur, sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah, sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur dan sebagai dasar pemberian reward atau penghargaan dan sanksi.

Adapun rincian mengenai Perjanjian Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2020, adalah sebagai berikut:

Tabel 2.7
Perjanjian Kinerja Tahun 2020

Sasaran	Indikator Sasaran	Target 2020
1. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Sekretariat Daerah	1. Nilai evaluasi SAKIP Sekretariat Daerah	72,5
	2. Persentase Temuan Hasil Pemeriksaan yang ditindaklanjuti	100%
2. Meningkatnya kualitas pelaksanaan pemerintahan	1. Nilai LPPD Pemerintah Daerah	3.8
3. Meningkatnya kualitas kinerja pemerintah daerah	1. Persentase capaian kinerja pemerintah daerah	100%
	2. Persentase penyerapan anggaran pemerintah daerah	94%
	3. Persentase paket pengadaan yang dilaksanakan	100%
4. Terpenuhinya kualitas tatalaksana dan pelayanan publik pemerintah daerah	1. Survey kepuasan masyarakat (SKM) atas pelayanan publik	83
	2. Persentase perangkat daerah yang tatalaksananya baik	90%
	3. Nilai Evaluasi Kinerja BUMD	59
5. Tersedianya regulasi daerah yang memadai	1. Persentase regulasi daerah yang ditetapkan sesuai dengan amanat peraturan di atasnya	100%

2.6. Program Untuk Pencapaian Sasaran

Berdasarkan visi, misi ,tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan yang telah ditetapkan dalam RPJMD, perlu upaya untuk pencapaian sasaran yang dirumuskan dalam program prioritas daerah. Adapun program prioritas untuk mencapai sasaran dan target kinerja Tahun 2020 sebagai mana tercantum dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja) Tahun 2020 sebagai berikut :

Tabel 2.8.
Program Prioritas Sekretariat Daerah Tahun 2020

No.	Program / Kegiatan	Anggaran (Rp)
1.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	9.425.357.000
2.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	25.900.000
3.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	2.141.900.000
4.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	202.443.000
5.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	43.580.000
6.	Program Penguatan dan Penataan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	157.403.500
7.	Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah / wakil Kepala Daerah	1.704.102.000
8.	Program Pengembangan Data dan informasi	39.870.000
9.	Program Pembinaan dan Pengembangan SDM	361.918.400
10.	Program Pembinaan Kehidupan Beragama	2.067.270.000
11.	Program Kerjasama Pembangunan	48.705.000
12.	Program Penetapan dan Penegasan Batas Wilayah	43.415.000
13.	Program Pengembangan Kebijakan Perekonomian Pembangunan	284.870.000
14.	Program Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Secara Elektronik	1.277.131.000
15.	Program Sarana Informasi Pembangunan Daerah	25.650.000
16.	Program Penataan dan Penguatan Kelembagaan	100.632.000
17.	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	131.943.000
18.	Program Penataan dan Penguatan Ketatalaksanaan	95.726.000
19.	Program Pembinaan BUMD	200.525.000
20.	Program Penataan Peraturan Perundang-undangan	1.698.372.000
		20.076.712.900

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Laporan akuntabilitas kinerja pemerintah merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja sesuai dengan yang diamanatkan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviuw atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Akuntabilitas merupakan perwujudan dari kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban dan berupa laporan akuntabilitas yang disusun secara periodik.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Sekretariat Daerah Kabupaten Bangka Barat disusun dengan rangkaian mekanisme fungsi perencanaan yang sudah berjalan mulai dari Perencanaan Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja Tahunan (Renja), dan Penetapan Kinerja (PK) Sekretariat Daerah Kabupaten Bangka Barat.

Dalam rangka meningkatkan akuntabilitas kinerja untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik (*Good Governance*), Sekretariat Daerah Kabupaten Bangka Barat terus melakukan perbaikan manajemen kinerja mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi. Selanjutnya untuk menilai kinerja yang telah dicapai, dilakukan pengukuran kinerja dengan cara membandingkan target setiap indikator dengan realisasinya. Setelah dilakukan penghitungan akan diketahui selisih atau celah kinerja (*performance gap*). Berdasarkan selisih kinerja tersebut dilakukan evaluasi guna mendapatkan strategi yang tepat untuk peningkatan kinerja di masa mendatang.

3.1. Kerangka Pengukuran Kinerja

Pengukuran *kinerja* digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan sasaran kinerja berdasarkan indikator dan target yang telah ditetapkan yang selanjutnya dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

Pengukuran capaian kinerja dilakukan dengan menggunakan metode perbandingan capaian kinerja dengan target kinerja yang telah ditetapkan. Metode perbandingan capaian kinerja tersebut dilakukan antara rencana dengan realisasi kinerja (*performance plan*) yang selanjutnya akan dilakukan analisis terhadap penyebab terjadinya celah kinerja (*performance gap*). Metode ini digunakan untuk memberikan gambaran kepada pihak-pihak eksternal

tentang sejauh mana pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan Sekretariat Daerah Kab. Bangka Barat yang telah ditetapkan.

Pengukuran kinerja untuk Laporan Kinerja Tahun 2020 dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Adapun kerangka pengukuran kinerja berdasarkan Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/6/8/2003 adalah dengan rumus sebagai berikut:

1. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja, digunakan rumus:

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tinggi kinerja, digunakan rumus:

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Target} - (\text{Realisasi} - \text{Target})}{\text{Target}} \times 100\%$$

Untuk mempermudah interpretasi atas pencapaian indikator kinerja apakah melebihi target, sesuai target atau tidak mencapai target, dalam penyajian Laporan Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2020 digunakan 2 (dua) skala penilaian yaitu :

1. Pengukuran Capaian Tahunan

Penetapan angka capaian kinerja terhadap hasil persentase capaian tahunan menggunakan 2 (dua) kategori yaitu ”**tercapai**” dan ”**tidak tercapai**”. Untuk capaian indikator yang mencapai 100 persen atau lebih maka dikategorikan ”**tercapai**” dan apabila belum mencapai 100 persen dikategorikan ”**tidak tercapai**”.

Cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran yang memiliki lebih dari 1 (satu) indikator kinerja dilakukan dengan membuat rata-rata atas capaian indikator kinerja. Kategori ini digunakan untuk memperlihatkan secara jelas ketercapaian dan keberhasilan masing-masing indikator kinerja sehingga dapat menjadi peringatan dan perhatian selanjutnya untuk dapat menjadi perbaikan kedepan dalam rangka mencapai target indikator dan sasaran yang ditetapkan.

Tabel 3.1
Penilaian Capaian Tahunan

Nilai Capaian (%)	Kategori
≥ 100	Tercapai
< 100	Tidak tercapai

2. Pengukuran Capaian Akhir Renstra

Pengukuran Capaian Akhir Renstra dilakukan terhadap capaian indikator kinerja sasaran yang dibagi menjadi 3 (tiga) skala dengan 3 (tiga) kategori.

Tabel 3.2
Penilaian Capaian Kinerja Sasaran terhadap Target Akhir Renstra

Nilai Capaian (%)	Kategori
≥ 100	Tercapai
≥ 90 s.d < 100	Optimis tercapai
< 90	Perlu upaya lebih

3.2. Capaian Sasaran Renstra Tahun 2020

Berdasarkan Perubahan Perjanjian Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2020 yang disusun berdasarkan Peraturan Bupati Bangka Barat No. 79 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Bangka Barat No. 39 Tahun 2017 tentang Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2016-2021 telah ditetapkan 5 Sasaran dengan 8 Indikator Sasaran yang harus dicapai di Tahun 2020 sebagaimana di tampilkan pada Tabel 3.3 di bawah ini.

Tabel 3.3
Capaian Sasaran Renstra (Perjanjian Kinerja Eselon IIA) Sekretariat Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2020

No.	Sasaran	Indikator Sasaran	Keterangan	Satuan	Target	Realisasi	Persentase Capaian
1.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Sekretariat Daerah	1. Nilai evaluasi SAKIP Sekretariat Daerah	Bukan IKU	Nilai	72,5	72,4*	99,86
		2. Persentase Temuan Hasil Pemeriksaan yang ditindaklanjuti	Bukan IKU	Persen	100	Tidak Ada Temuan	100.00

2.	Meningkatnya kualitas pelaksanaan pemerintahan	1. Nilai LPPD Pemerintah Daerah	IKU	Nilai	3.8	3,26**	85,79
3.	Meningkatnya kualitas kinerja pemerintah daerah	1. Persentase capaian kinerja pemerintah daerah	IKU	Persen	100	95,77	95,77
		2. Persentase penyerapan anggaran pemerintah daerah	IKU	Persen	94	90,45	96,22%
		3. Persentase paket pengadaan yang dilaksanakan	IKU	Persen	100	100	100
4.	Terpenuhinya kualitas tatalaksana dan pelayanan publik pemerintah daerah	1. Survey kepuasan masyarakat (SKM) atas pelayanan publik	IKU	Nilai	83	80,98	97,57
		2. Persentase perangkat daerah yang tatalaksananya baik	IKU	Persen	90	26,67	29,63
		3. Nilai Evaluasi Kinerja BUMD	IKU	Nilai	59	61,2*	103,73
5.	Tersedianya regulasi daerah yang memadai	Persentase regulasi daerah yang ditetapkan sesuai dengan amanat peraturan di atasnya	IKU	Persen	100	86,73	86,73
Rata-rata Capaian (persen)							89,53

Catatan: Tanda bintang (*) merupakan data atas penilaian kinerja Tahun 2019
(**) merupakan data atas penilaian kinerja Tahun 2018

Berdasarkan Tabel 3.3 dari 10 (sepuluh) indikator kinerja sasaran Sekretariat Daerah terdapat 3 (tiga) indikator kinerja sasaran yang memenuhi atau melampaui target kinerja yaitu indikator kinerja Persentase Temuan Hasil Pemeriksaan yang ditindaklanjuti, indikator Persentase paket pengadaan yang dilaksanakan dan indikator kinerja Nilai Evaluasi Kinerja BUMD.

Terhadap target indikator kinerja yang telah ditetapkan beserta capaian kinerja masing-masing sasaran dilakukan analisis dan evaluasi sebagai berikut :

3.2.1 Sasaran Strategis 1 “Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Sekretariat Daerah”

Sasaran ” Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Sekretariat Daerah” diukur dengan 2 (dua) indikator kinerja yaitu Nilai evaluasi SAKIP Sekretariat Daerah dan Persentase Temuan Hasil Pemeriksaan yang ditindaklanjuti. Nilai yang dikeluarkan pada Tahun 2020 merupakan penilaian atas kinerja Tahun 2019.

Tabel 3.4
Capaian Indikator Kinerja Sasaran
“Meningkatnya Akuntabilits Kinerja Sekretariat Daerah Tahun 2020”

INDIKATOR KINERJA SASARAN	SATUAN	REALISASI TAHUN 2019	TARGET TAHUN 2020	REALISASI TAHUN 2020	%	STATUS CAPAIAN
1. Nilai evaluasi SAKIP Sekretariat Daerah	Nilai	72,06	72,5	72,4	99,86%	Tidak Tercapai
2. Persentase Temuan Hasil Pemeriksaan yang ditindaklanjuti	Persen	100	100	Tidak ada temuan	100%	Tercapai
Rata-Rata Capaian (persen)					99,93	TidakTercapai

Berdasarkan tabel di atas pada Tahun 2020 hanya indikator kinerja ” Persentase Temuan Hasil Pemeriksaan yang ditindaklanjuti” yang dapat dicapai. Rata-rata capaian sasaran sebesar 99,93 persen dengan status Tidak Tercapai. Secara rinci, capaian masing-masing indikator dapat dijelaskan sebagai berikut :

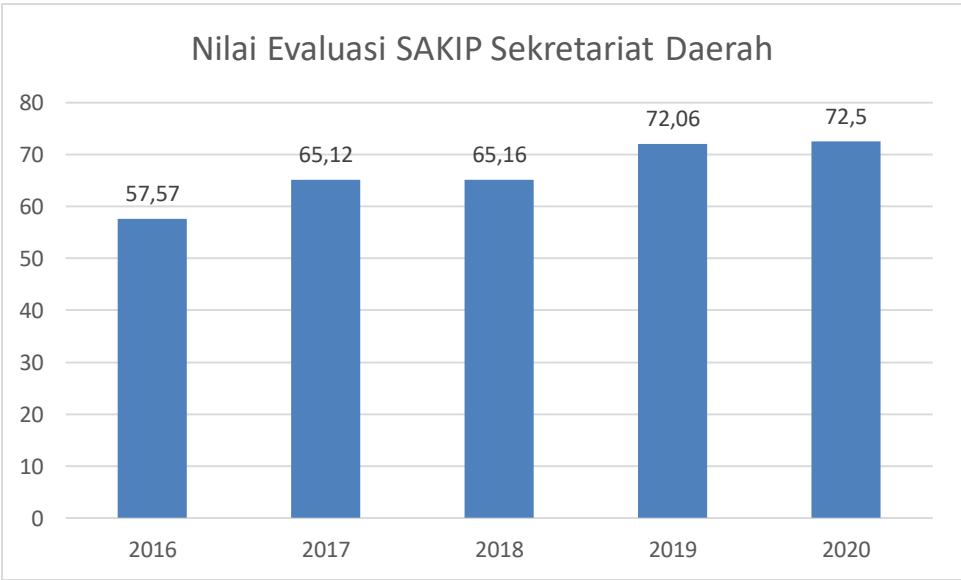
3.2.1.1. Indikator Kinerja “Nilai Evaluasi SAKIP Sekretariat”.

Penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) memberikan informasi tentang sejauh mana pelaksanaan akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan Program dan Kegiatan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran / target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja Instansi Pemerintah yang disusun secara periodik. Penilaiannya meliputi Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, Evaluasi Internal dan Capaian Kinerja.

Pada Tahun 2020, hasil evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Sekretariat Daerah Kabupaten Bangka Barat untuk kinerja Tahun 2019 mendapat

nilai 72,4 dengan predikat “BB” (Sangat Baik). Pencapaian ini kurang dari target yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Sekretariat Daerah dimana target yang ditetapkan terkait nilai SAKIP daerah Tahun 2019 adalah 72,5 akan tetapi meningkat dari capaian Tahun 2019 (atas laporan kinerja Tahun 2018) yaitu sebesar 72,06 meningkat sebesar 0,44 point.

Jika dibandingkan dengan pencapaian di tahun-tahun sebelumnya selama 5 (lima) tahun terakhir pencapaian hasil evaluasi SAKIP Sekretariat Daerah Kabupaten Bangka Barat terus mengalami peningkatan sebagaimana ditampilkan pada Gambar 3.1.



Sumber: Setda Kab. Bangka Barat, 2021 (diolah)

Gambar 3.1
Hasil Evaluasi SAKIP Kabupaten Bangka Barat Tahun 2016-2020

Pencapaian hasil evaluasi SAKIP Sekretariat Daerah Kabupaten Bangka Barat 5 (lima) tahun terakhir, secara umum terus mengalami peningkatan nilai, dengan peningkatan yang tertinggi pada Tahun 2017 yaitu sebesar 7,55 point dari nilai 57,57 pada Tahun 2016 meningkat menjadi 65,12 pada Tahun 2017. Jika dilihat perbandingan pencapaian hasil evaluasi SAKIP Tahun 2019 dan 2020 secara lebih detail, dengan memperhatikan komponen penilaian SAKIP, hanya 1 (satu) komponen yg mengalami peningkatan nilai yaitu komponen pelaporan kinerja meningkat sebesar 0,35 point sebagaimana ditampilkan pada Tabel 3.5.

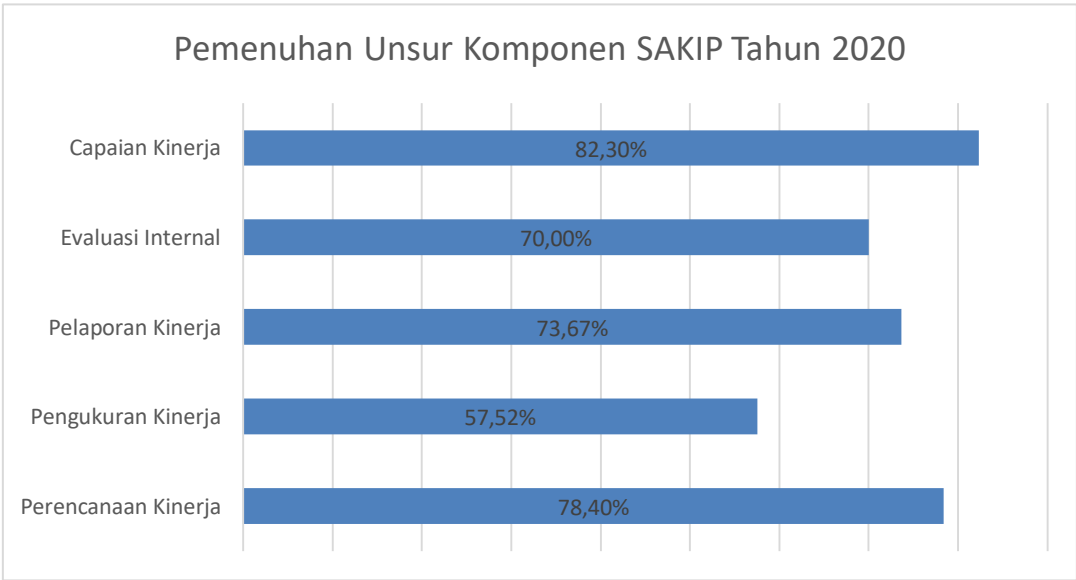
Tabel 3.5.
Komponen Hasil Evaluasi SAKIP Kabupaten Bangka Barat Tahun 2019-2020

KOMPONEN	BOBOT	2019	2020	KET
Perencanaan Kinerja	30	23.52	23,52	tetap
Pengukuran Kinerja	25	14.38	14,38	tetap
Pelaporan Kinerja	15	10.70	11,05	meningka t
Evaluasi Internal	10	7.00	7,00	tetap

Capaian Kinerja	20	16.46	16,46	tetap
Nilai Hasil Evaluasi	100	72,06	72,40	

Sumber: Inspektorat Daerah Kab. Bangka Barat, 2021 (diolah)

Dan apabila di ukur pemenuhan unsur komponen SAKIP Sekretariat Daerah Tahun 2019 terhadap bobot masing-masing komponen SAKIP, tampak bahwa kinerja terbaik adalah capaian kinerja, yaitu sudah terpenuhi 82,30 persen dan yang paling rendah adalah pengukuran kinerja baru terpenuhi 57,52 persen dari total bobot komponennya, seperti ditampilkan pada Gambar 3.6.



Sumber: Setda Kab. Bangka Barat, 2021 (diolah)

Gambar 3.2
Pemenuhan Unsur Komponen SAKIP pada Tahun 2020

Dengan demikian Sekretariat Daerah Kab. Bangka Barat perlu memberikan perhatian yang lebih terhadap komponen SAKIP yang capaian nya masih rendah yaitu pengukuran kinerja, evaluasi internal dan pelaporan kinerja. Terkait pengukuran kinerja, salah satu yang menjadi kendala adalah belum digunakannya aplikasi atau dengan kata lain pengukuran kinerja belum dilakukan secara elektronik, sehingga keakuratan dan kontinuitas data / pegukuran masih dianggap kurang handal. Akan tetapi semenjak dikeluarkannya Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, sulit bagi masing-masing Perangkat Daerah untuk mengadakan aplikasi sendiri-sendiri, karena arahnya harus dikelola secara terpadu bahkan sampai level nasional, sehingga seharusnya menjadi kebijakan di level daerah untuk menyelesaikan permasalahan ini.

Beberapa faktor yang menjadi penyebab peningkatan capaian indikator kinerja nilai evaluasi SAKIP Sekretariat Daerah di Tahun 2020 disebabkan oleh beberapa hal, antara lain:

- a. Adanya upaya perbaikan dalam perencanaan kinerja antara lain melalui perubahan Renstra sehingga terpenuhi komponen komponen perencanaan strategis baik dari sisi

- pemenuhan maupun kualitas;
- b. Adanya upaya perbaikan kualitas perencanaan kinerja tahunan;
- c. Adanya upaya untuk mengimplementasikan perencanaan kinerja tahunan;
- d. Adanya upaya perbaikan dalam pengukuran kinerja antara lain melakukan perubahan Indikator Kinerja Utama sebagai akibat perubahan perencanaan strategis;
- e. Melakukan penyusunan perjanjian kinerja mulai dari eselon tertinggi sampai dengan tingkat eselon terendah;

Capaian kinerja indikator nilai evaluasi SAKIP Sekretariat Daerah Kabupaten Bangka Barat di Tahun 2020 jika dibandingkan dengan target capaian di akhir Tahun Renstra, masih memiliki pekerjaan rumah untuk beberapa tahun kedepannya. Beberapa komponen SAKIP masih harus ditingkatkan, agar target akhir Renstra dapat tercapai. Akan tetapi, jika melihat persentase capaian kinerja di Tahun 2019 dan dengan terus memperbaiki kualitas unsur-unsur penilaian SAKIP, Sekretariat Daerah Kabupaten Bangka Barat optimis bahwa target Nilai Sakip Sekretariat Daerah di akhir Renstra akan dapat tercapai sebagaimana di tampilkan pada Tabel 3.6 .

Tabel 3.6
 Capaian Indikator Kinerja “Nilai SAKIP Sekretariat Daerah” Tahun 2020
 terhadap Target Akhir Renstra

INDIKATOR KINERJA SASARAN	SATUAN	REALISASI TAHUN 2020	TARGET AKHIR RENSTRA	%	STATUS CAPAIAN
Nilai SAKIP Sekretariat Daerah	Nilai	72,4	73,00	99,18	Optimis Tercapai

Upaya-upaya yang akan dilakukan oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Bangka Barat guna meningkatkan pencapaian nilai SAKIP pada tahun mendatang, sesuai dengan rekomendasi dari Inspektorat Kab. Bangka Barat adalah sebagai berikut:

No	Rekomendasi atas penilaian SAKIP Setda Tahun 2020	Tindak lanjut
1.	Menyajikan dokumen Rencana Aksi yang didalamnya memuat target secara periodik	Sudah dilaksanakan di Tahun 2020
2.	Menyusun pedoman atau SOP tentang pengumpulan data kinerja yang memadai	SOP tentang pengumpulan data kinerja sudah diusulkan ke Bagian Organisasi Setda Kab. Bangka Barat sd tahap verifikasi
3.	Menggunakan pengumpulan data kinerja atas Rencana Aksi sebagai pengendalian dan pemantauan kinerja secara berkala.	Sudah dilaksanakan di Tahun 2020 setiap triwulan
4.	Melakukan evaluasi dan analisa mengenai capaian kinerja (tercapai/tidak tercapai dan/atau pendukung dan/atau peng hambat).	Dilakukan pengendalian setiap triwulan melalui dalev rencana aksi setiap triwulan

5.	Menyajikan analisis efisiensi penggunaan sumber daya pada Laporan Akuntabilitas Kinerja.	Pada penyusunan Lakip Tahun 2019 sudah ditampilkan
6	Memanfaatkan hasil evaluasi internal secara optimal sehingga dapat menghasilkan dokumen yang lebih handal.	Dilakukan pengendalian setiap triwulan melalui dalev rencana aksi dan dalev renja setiap triwulan

Sumber: Setda Kab. Bangka Barat, 2021 (diolah)

3.2.1.2. Indikator Kinerja “Persentase Temuan Hasil Pemeriksaan yang Ditindaklanjuti”.

Sebagaimana ditampilkan pada Tabel 3.4 di atas, indikator kinerja Persentase Temuan Hasil Pemeriksaan yang ditindaklanjuti pada Tahun 2020 mencapai target yang ditetapkan yaitu 100 persen. Pada Tahun 2020 berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kab. Bangka Barat Tahun Anggaran 2020 Nomor: 92.C/LHP/XVIII.PPG/06/2020 Tanggal 11 Juni 2020, yaitu LHP atas Kepatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang - Undangan dan Nomor: 92.B/LHP/XVIII.PPG/06/2020 Tanggal 11 Juni 2020LHP atas yaitu LHP atas Sistem Pengendalian Internal maka tidak ada temuan yang harus di tindaklanjuti pada Perangkat Daerah Sekretariat Daerah, sehingga capaian kinerja untuk indikator Persentase Temuan Hasil Pemeriksaan yang Ditindaklanjuti adalah 100 persen, dengan asumsi bahwa tidak ditemukannya hal-hal yang tidak wajar dalam laporan keuangan Sekretariat Daerah Tahun 2018, sehingga dapat disimpulkan bahwa target kinerja tercapai.

Capaian kinerja indikator Persentase Temuan Hasil Pemeriksaan yang Ditindaklanjuti pada Sekretariat Daerah Kabupaten Bangka Barat di Tahun 2020 jika dibandingkan dengan target capaian di akhir Tahun Renstra dinilai dapat tercapai, apabila upaya-upaya yang mendukung terwujudnya pelaporan keuangan yang transparan, bersih dan akuntabel terus dilakukan serta apabila ada temuan terhadap hasil pemeriksaan segera ditindaklanjuti. Tabel yang menunjukan perbandingan kinerja Tahun 2019 dan akhir Renstra di tampilkan pada Tabel 3.7.

Tabel 3.7
 Capaian Indikator Kinerja “Persentase Temuan Hasil Pemeriksaan yang Ditindaklanjuti”
 Tahun 2020 terhadap Target Akhir Renstra

INDIKATOR KINERJA SASARAN	SATUAN	REALISASI TAHUN 2019	TARGET AKHIR RENSTRA	%	STATUS CAPAIAN
Persentase Temuan Hasil Pemeriksaan yang Ditindaklanjuti	persen	100,00	100,00	100	Optimis Tercapai

Dalam pencapaian sasaran meningkatnya akuntabilitas Kinerja Sekretariat Daerah, Program yang dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Bangka Barat adalah sebagai berikut:

- 1. Program pelayanan administrasi perkantoran;
- 2. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur;
- 3. Program peningkatan disiplin aparatur;
- 4. Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan ihhtisar realisasi kinerja SKPD.

3.2.2 Sasaran Strategis 2 “Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Pemerintahan”

Sasaran Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Pemerintahan diukur dengan indikator kinerja Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Pemerinah Daerah. Penilaian LPPD Kabupaten/Kota di tingkat Provinsi dilakukan oleh Tim Daerah EKPPD Provinsi Kep. Bangka Belitung. Selanjutnya Kementerian Dalam Negeri menetapkan peringkat dan status kinerja penyelenggaraan pemerintahan melalui keputusan Menteri dalam Negeri pada saat peringatan hari Otonomi Daerah yang jatuh pada Bulan April, sehingga nilai capaian yang dilaporkan pada Tahun 2020 adalah hasil penilaian tingkat Kabupaten atas LPPD Tahun 2018.

Berdasarkan Penetapan Hasil Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD) atas LPPD Kabupaten Bangka Barat Tahun 2018 yang dikeluarkan pada Tahun 2020 Nilai LPPD Kab. Bangka Barat Tahun 2020 adalah 3,26 dengan kategori “Sangat Tinggi”. Capain indikator kinerja sasaran Tahun 2019 dan tahun sebelumnya sebagaimana ditampilkan pada Tabel 3.8.

Tabel 3.8
Capaian Indikator Kinerja Sasaran
Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Pemerintahan

INDIKATOR KINERJA SASARAN	SATUAN	REALISASI TAHUN 2019	TARGET TAHUN 2020	REALISASI TAHUN 2020	%	STATUS CAPAIAN
Nilai LPPD Pemerintah Daerah	Nilai	3,05	3,80	3,30	86,84	Tidak Tercapai

Berdasarkan Tabel di atas, indikator kinerja Nilai LPPD Pemertintah Daerah Tahun 2020 atas LPPD Tahun 2018 adalah sebesar 3,26 dengan tingkat capaian sebesar 86,84 persen atau dengan kata lain tidak mencapai target. Ketidak berhasilan pencapaian target kinerja tersebut antara lain disebabkan oleh masih adanya beberapa indikator kinerja kunci (IKK) yang capaian kinerja nya “Rendah”.

Berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi (LHE) ada beberapa rekomendasi yang harus menjadi perhatian Pemerintah Daerah adalah:

1. Tataran Pengambil Kebijakan.

Terhadap IKK yang memperoleh prestasi “sedang” yaitu Intensitas, Efektifitas dan Transparansi Pemungutan Sumber-sumber PAD dan Pinjaman / Obligasi Daerah agar ditingkatkan capaian kinerjanya dimasa yang akan datang

2. Tataran Pelaksana Kebijakan

a. Administrasi Umum

Terhadap 107 IKK yang dilaksanakan Perangkat Daerah dengan prestasi “ Rendah” agar ditingkatkan capaian kinerja nya di masa yang akan datang (terlampir)

b. Capaian Kinerja

Terhadap uruan wajib kepemudaan dan olahraga dengan prestasi sedang dan urusan pilihan pariwisata dengan prestasi rendah agar ditingkatkan capaian kinerja nya di masa yang akan datang.

Walaupun indikator kinerja Tahun 2020 tidak tercapai, akan tetapi jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya peningkatan capaian kinerja indikator Nilai LPPD Pemerintah Daerah cukup signifikan sebagaimana ditampilkan pada gambar 3.3.



Sumber: Sekretariat Daerah, 2020 (diolah)

Gambar 3.3
Capaian Kinerja Nilai LPPD Pemerintah Daerah Tahun 2016-2020

Jika dibandingkan dengan capaian akhir Renstra, tingkat capaian kinerja Sasaran “Meningkatnya kualitas pelaksanaan pemerintahan” Tahun 2020 terhadap Target Akhir Renstra (2021) yaitu sebesar 86,84 sehingga karena tingkat capaian < 90 persen, maka

diperlukan upaya lebih untuk mencapai target akhir renstra sebagaimana ditampilkan pada Tabel 3.9.

Tabel 3.9.
Capaian Indikator Kinerja Sasaran “Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Pemerintahan”
Tahun 2020 terhadap Target Akhir Renstra

INDIKATOR KINERJA SASARAN	SATUAN	REALISASI TAHUN 2020	TARGET AKHIR RENSTRA	%	STATUS CAPAIAN
Nilai LPPD Pemerintah Daerah	Nilai	3,26	3,80	86,84	Perlu upaya lebih

Dalam pencapaian sasaran Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Pemerintahan, program yang dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Bangka Barat adalah sebagai berikut:

1. Program Penguatan dan Penataan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
2. Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah / wakil Kepala Daerah;
3. Program Pengembangan Data dan informasi;
4. Program Pembinaan dan Pengembangan SDM
5. Program Pembinaan Kehidupan Beragama
6. Program Kerjasama Pembangunan
7. Program Penetapan dan Penegasan Batas Wilayah
8. Program Penataan Wilayah dan Kelembagaan

3.2.3 Sasaran Strategis “Meningkatnya Kualitas Kinerja Pemerintah Daerah”

Sasaran Meningkatnya Kualitas Kinerja Pemerintah Daerah diukur dengan 3 (tiga) indikator kinerja yaitu: 1). Persentase capaian kinerja pemerintah daerah; 2). Persentase penyerapan anggaran pemerintah daerah; 3). Persentase paket pengadaan yang dilaksanakan. Capaian Kinerja ke 3 (tiga) indikator tersebut disajikan pada Tabel 3.10 di bawah ini.

Tabel 3.10.
Capaian Kinerja Indikator Sasaran “Meningkatnya Kualitas Kinerja Pemerintah Daerah” Tahun 2020

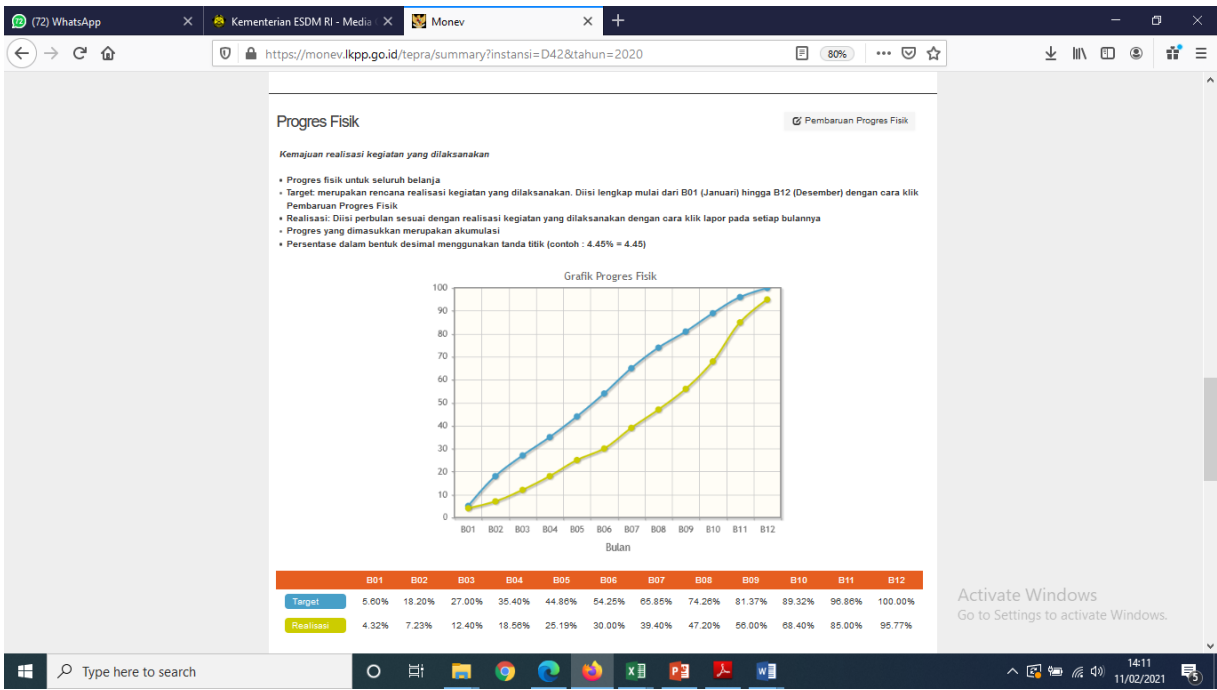
INDIKATOR KINERJA SASARAN	SATUAN	REALISASI TAHUN 2019	TARGET TAHUN 2020	REALISASI TAHUN 2020	%	STATUS CAPAIAN
Persentase capaian kinerja pemerintah daerah	Persen	92,6	100	95,77	95,77	Tidak Tercapai
Persentase	Persen	88,53	94	90,37		Tidak

penyerapan anggaran pemerintah daerah					96,14	Tercapai
Persentase paket pengadaan yang dilaksanakan	Persen	93,81	100	100	100	Tercapai
Rata-Rata Tingkat Capaian					97,30	Tidak Tercapai

Berdasarkan Tabel 3.10 Rata-rata capaian kinerja Sasaran “Meningkatnya Kualitas Kinerja Pemerintah Daerah” Tahun 2019 adalah sebesar 97,30 meningkat 5,65 point dari Tahun 2019 yaitu sebesar 91,65 dengan status capaian “Tidak Tercapai”, dengan penjelasan sebagai berikut:

3.2.3.1 Indikator Kinerja “Persentase Capaian Kinerja Pemerintah Daerah”

Persentase Capaian Kinerja Pemerintah Daerah diambil dari data aplikasi eMonev-Lkpp berupa realisasi fisik kegiatan seluruh Perangkat Daerah. Persentase Capaian Kinerja Pemerintah Daerah Tahun 2020 sebagaimana ditampilkan pada Gambar 3.4 di bawah ini.



Sumber: Data aplikasi Monev LKPP, 2020

Gambar 3.4
Persentase capaian Kinerja Pemerintah Daerah Tahun 2020 berdasarkan aplikasi eMonev LKPP

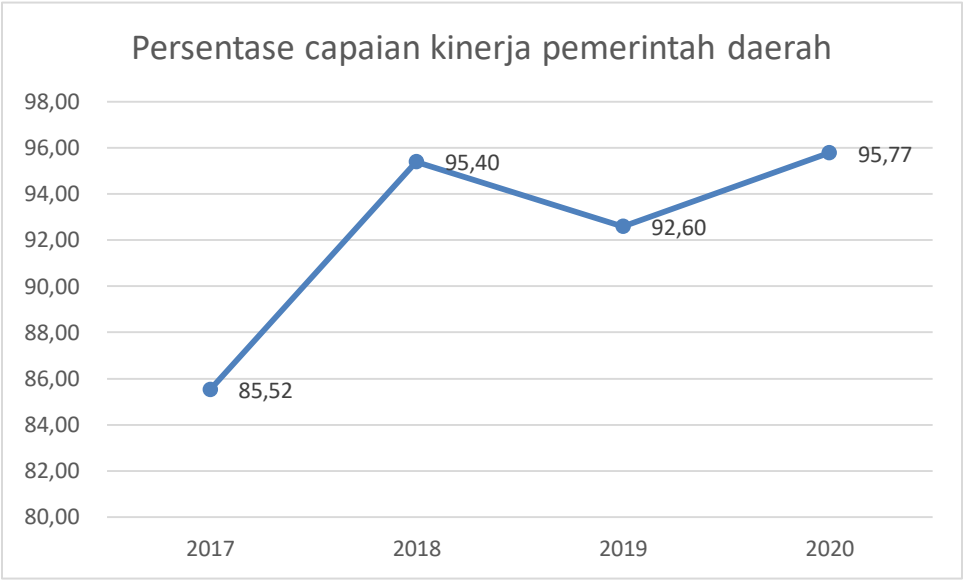
Jika dibandingkan dengan target kinerja sebagaimana ditampilkan pada Tabel 3.10 terlihat bahwa capaian kinerja indikator Persentase Capaian Kinerja Pemerintah Daerah Tahun 2020 adalah sebesar 95,77 dengan tingkat capaian sebesar 95,77 persen yang berarti target “Tidak Tercapai”. Akan tetapi capaiannya naik dari Tahun sebelumnya yaitu 92,60

persen dari target 100 persen meningkat sebesar 3,17 point. Ketidak berhasilan pencapaian target kinerja disebabkan karena tidak terlaksananya beberapa kegiatan maupun hanya terlaksana sebagian baik yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus maupun yang berasal dari APBD murni sebagaimana di jelaskan pada Tabel 3.11 di bawah ini.

Tabel 3.11.
Daftar beberapa Kegiatan Perangkat Daerah yang Tidak Terlaksana / Terlaksana Sebagian pada Tahun 2019

No.	Perangkat Daerah	Kegiatan yang tidak terlaksana /terlaksana sebagian	Keterangan
1.	Dinas Pendidikan	1. Pengadaan Alat Peraga Jenjang SD	Ada 2 kegitan gagal tender
		2. Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa SMP (DAK)	Ada 1 kegitan gagal tender
2.	Dinas Pekerjaan Umum	1. Kegiatan Pembuatan Proda Bagi Masyarakat	Tidak terlaksana
		2. Kegiatan Pembuatan Sertifikat Aset Pemda	terlaksana 28 persil dari target 33 persil
		3. Kegiatan Pembebasan Lahan untuk Kegiatan Pembangunan Perencanaan Daerah	ganti rugi dari 15 persil terlaksana 13 persil
		4. Pembangunan Talud Jebu Laut Desa Kelabat	Gagal lelang

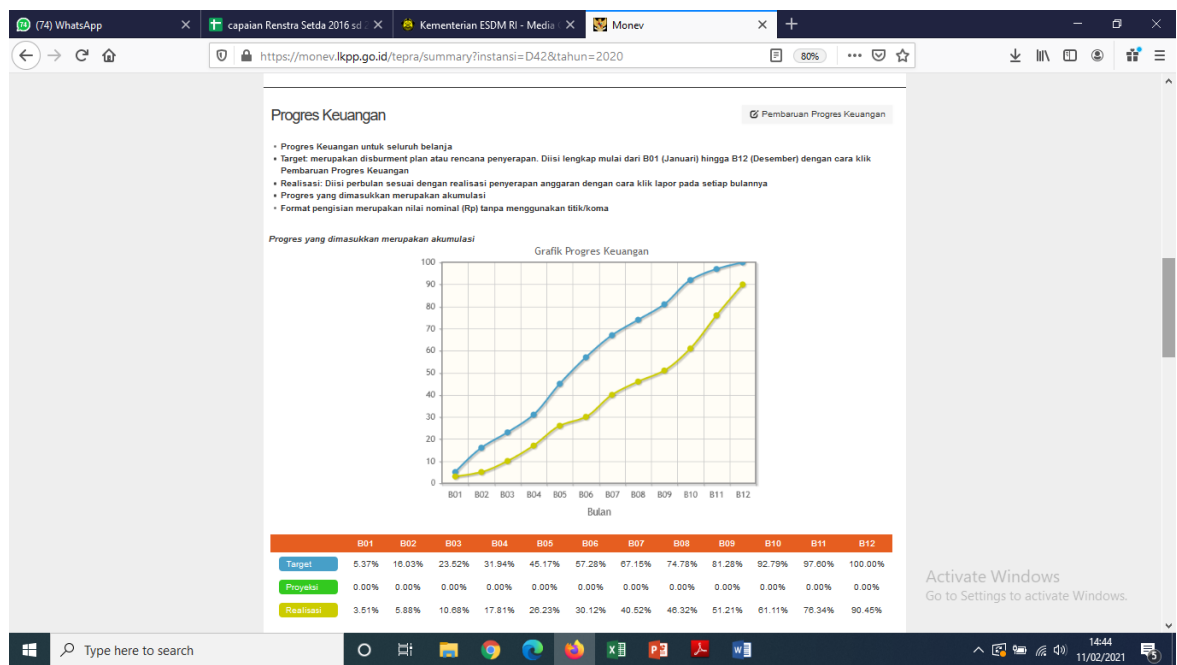
Jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya realisasi capaian kinerja indikator kinerja Persentase Capaian Kinerja Pemerintah Daerah sempat naik pada Tahun 2020 terus mengalami peningkatan dan merupakan capaian tertinggi selama 4 (empat) tahun terakhir sebagaimana ditampilkan pada Gambar 3.5.



Gambar 3.5
Perkembangan capaian Kinerja Pemerintah Daerah Tahun 2017-2020

3.2.3.2 Indikator Kinerja “Persentase penyerapan anggaran pemerintah daerah”

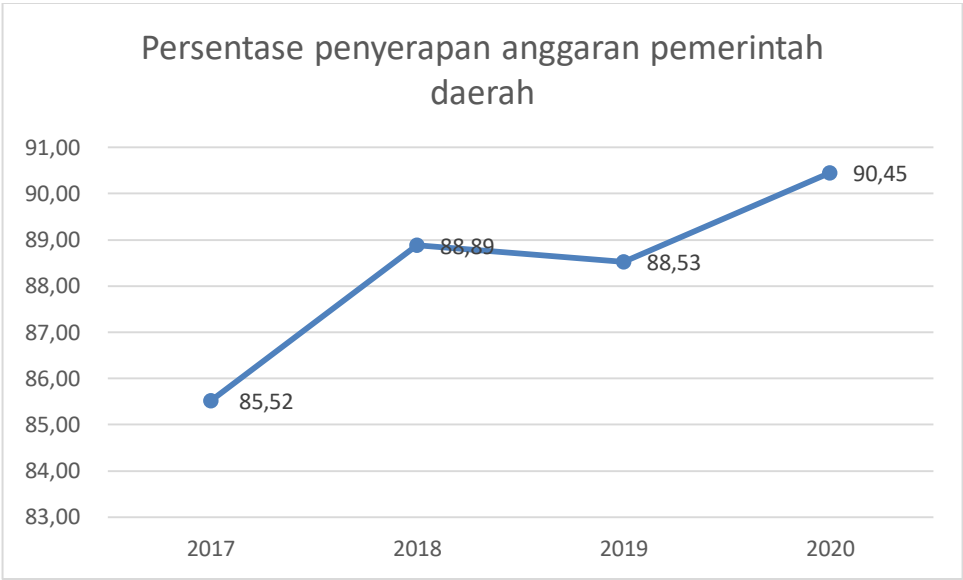
Data capaian Indikator Kinerja Persentase Penyerapan Anggaran Pemerintah Daerah diambil dari data aplikasi eMonev-Lkpp berupa realisasi keuangan kegiatan seluruh Perangkat Daerah. Persentase Capaian Kinerja Pemerintah Daerah Tahun 2020 sebagaimana ditampilkan pada Gambar 3.4 di bawah ini.



Gambar 3.6
Persentase Penyerapan Anggaran Pemerintah Daerah Tahun 2020 berdasarkan aplikasi eMonev LKPP

Jika dibandingkan dengan target kinerja sebagaimana ditampilkan pada Tabel 3.10 terlihat bahwa capaian kinerja indikator Persentase Penyerapan Anggaran Pemerintah Daerah Tahun 2020 adalah sebesar 90,45 persen dari target 94 persen dengan tingkat capaian sebesar 96,22 persen yang berarti target “Tidak Tercapai”. Capaian tahun ini lebih rendah dari capaian tahun sebelumnya yaitu 95,19 persen. Ketidak berhasilan pencapaian target kinerja sama seperti indikator capaian kinerja pemerintah daerah yaitu disebabkan karena tidak terlaksananya beberapa kegiatan maupun hanya terlaksana sebagian baik yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus maupun yang berasal dari APBD murni sebagaimana di jelaskan pada Tabel 3.11 di atas.

Jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya realisasi capaian kinerja indikator kinerja Persentase Penyerapan Anggaran Pemerintah Daerah pada Tahun 2020 relatif terus meningkat dan pada Tahun 2020 meningkat sebesar 1,92 point sebagaimana ditampilkan pada Gambar 3.7.



Gambar 3.7

Perkembangan capaian Kinerja Indikator Kinerja Persentase Penyerapan Anggaran Pemerintah Daerah Tahun 2017-2020

3.2.3.3 Indikator Kinerja “Persentase paket pengadaan yang dilaksanakan”

Data capaian indikator Kinerja Persentase Paket Pengadaan Yang Dilaksanakan diambil dari data Bagian Pengadaan Barang dan Jasa berupa persentase pengadaan yang dilaksanakan dari keseluruhan paket pengadaan yang di sampaikan ke Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kab. Bangka Barat.

Jika dibandingkan dengan target kinerja Tahun 2020 sebagaimana ditampilkan pada Tabel 3.10 terlihat bahwa capaian kinerja indikator Persentase Paket Pengadaan yang Dilaksanakan Tahun 2020 adalah sebesar 100 persen yang berarti target “Tercapai”. Keberhasilan pencapaian target kinerja disebabkan antara lain karena anggota pokja sudah menjadi pegawai tetap di Bagian Pengadaan Barang da Jasa, sehingga lebih focus dalam melaksanakan tugas-tugasnya, Penyampaian DPP oleh Perangkat Daerah tepat waktu dan jaringan internet yang sudah memadai. Data capaian indikator kinerja selama 5 tahun terakhir disajikan sebagaimana ditampilkan pada Gambar 3.8.



Sumber: Sekretariat Daerah, 2020 (diolah)

Gambar 3.8
Perkembangan capaian Kinerja Indikator Kinerja Persentase Paket Pengadaan Yang Dilaksanakan Tahun 2016-2020

Jika dibandingkan dengan capaian akhir Renstra, tingkat capaian kinerja Sasaran “Meningkatnya Kualitas Kinerja Pemerintah Daerah” Tahun 2020 terhadap Target Akhir Renstra (2021) yaitu rata-rata sebesar 98,33 persen dengan tingkat capaian 96,99 sehingga karena tingkat capaian > 90 persen, maka disimpulkan bahwa target akhir renstra optimis tercapai sebagaimana ditampilkan pada Tabel 3.12.

Tabel 3.12.
Capaian Indikator Kinerja Sasaran “Meningkatnya Kualitas Kinerja Pemerintah Daerah” Tahun 2020 terhadap Target Akhir Renstra

INDIKATOR KINERJA SASARAN	SATUAN	REALISASI TAHUN 2020	TARGET AKHIR RENSTRA	%	STATUS CAPAIAN
Persentase capaian kinerja pemerintah daerah	Persen	95,77	100	95,77	Optimis Tercapai
Persentase penyerapan anggaran pemerintah daerah	Persen	90,45	95	95,21	Optimis Tercapai
Persentase paket pengadaan yang dilaksanakan	Persen	100,00	100	100,00	Optimis Tercapai
RATA-RATA CAPAIAN			98,33	96,99	Optimis Tercapai

Dalam pencapaian sasaran Meningkatkan Kualitas Kinerja Pemerintah Daerah, program yang dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Bangka Barat adalah sebagai berikut:

1. Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi;
2. Program Pengembangan Kebijakan Perekonomian Pembangunan;

- 3. Program Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Secara Elektronik;
- 4. Program Sarana Informasi Pembangunan Daerah;

3.2.4 Sasaran Strategis “Terpenuhinya Kualitas Tatalaksana Dan Pelayanan Publik Pemerintah Daerah”

Sasaran Terpenuhinya Kualitas Tatalaksana Dan Pelayanan Publik Pemerintah Daerah diukur dengan 3 (tiga) indikator kinerja yaitu: 1). Survey kepuasan masyarakat (SKM) atas pelayanan publik; 2). Persentase perangkat daerah yang tatalaksananya baik; 3). Nilai Evaluasi Kinerja BUMD. Capaian Kinerja ke 3 (tiga) indikator tersebut disajikan pada Tabel 3.13 di bawah ini.

Tabel 3.13.
Capaian Kinrja Indikator Sasaran “Terpenuhinya Kualitas Tatalaksana Dan Pelayanan Publik Pemerintah Daerah” Tahun 2020

INDIKATOR KINERJA SASARAN	SATUAN	REALISASI TAHUN 2019	TARGET TAHUN 2020	REALISASI TAHUN 2020	%	STATUS CAPAIAN
1. Survey kepuasan masyarakat (SKM) atas pelayanan publik	Nilai	78,62	83	80,71	97,24	Tidak Tercapai
2. Persentase perangkat daerah yang tatalaksananya baik	Persen	13,33	90	49,7	55,22	Tidak Tercapai
3. Nilai Evaluasi Kinerja BUMD	Nilai	57, 99*	59	61,2	103,73	Tercapai
Rata-Rata Tingkat Capaian				63,87	85,40	Tidak Tercapai

Ket: * merupakan data penilaian yang dikeluarkan Tahun 2020 atas kinerja BUMD Tahun 2019

Berdasarkan Tabel 3.13 Rata-rata capaian kinerja Sasaran “Terpenuhinya Kualitas Tatalaksana Dan Pelayanan Publik Pemerintah Daerah” Tahun 2019 adalah sebesar 63,87 persene meningkat dari rata-rata capaian Tahun 2019 sebesar 49,98. Tingkat capaian kinerja Tahun 2020 sebesar 85,40 persen dengan demikian status capaian “Tidak Tercapai”, akan tetapi tingkat capaian meningkat sebesar 15,20 point dari 70,28 persen di Tahun 2019, penjelasan masing-masing indikator kinerja adalah sebagai berikut:

3.2.4.1. Indikator Kinerja “Survey kepuasan masyarakat (SKM) atas pelayanan publik”

Penghitungan nilai rata-rata atau indeks kepuasan masyarakat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2020 menggunakan data dari hasil survei Unit Pelayanan Publik / OPD yang telah menggunakan pedoman pelaksanaan survei berdasarkan Permenpan Nomor 14 Tahun 2017. Namun dari 22 unit pelayanan / Perangkat Daerah yang di survey masih terdapat 2 (dua) unit pelayanan (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan Kec. Tempilang) yang menggunakan pedoman pelaksanaan survei berdasarkan Permenpan Nomor 16 Tahun 2014, lebih baik dari Tahun 2019, yaitu baru 8 Unit Pelayanan Publik / OPD yang sudah menggunakan pedoman pelaksanaan survei berdasarkan Permenpan Nomor 14 Tahun 2017 sementara 18 (delapan belas) Unit Pelayanan Publik / OPD lainnya masih menggunakan pedoman pelaksanaan survei berdasarkan Permenpan Nomor 16 Tahun 2014.

Tabel 3.14 Indeks Survei Kepuasan Masyarakat pada Unit Pelayanan Publik Kabupaten Bangka Barat Tahun 2020

No .	Nama Unit Pelayanan	SKM 2020
1	Dinas Kesehatan	77,37
2	Dinas Pencatatan Sipil dan Kependudukan	74,41
3	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	81,41
4	Dinas pengelolaan Pajak dan Retaribusi Daerah	82,1
5	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, P3A	86,62
6	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	87,41
7	Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat	82,10
8	RSUD Sejiran Setason	76,82
9	Kecamatan Muntok	81,90
10	Kecamatan Simpang Teritip	85,48
11	Kecamatan Kelapa	80,75
12	Kecamatan Jebus	81,49
13	Kecamatan Parittiga	80,05
14	Kecamatan Tempilang	75,97
15	Puskesmas Muntok	78,42
16	Puskesmas Simpang Teritip	79,90
17	Puskesmas Kelapa	82,12
18	Puskesmas Sekarbiru	81,87
19	Puskesmas Puput	74,89
20	Puskesmas Tempilang	80,49
21	Puskesmas Jebus	83,25
22	Puskesmas Kundi	75,07
	RATA-RATA NILAI SKM PER TAHUN	1619,51
	IKM Tahun 2020	80,98

Jika dibandingkan dengan target kinerja sebagaimana ditampilkan pada Tabel 3.13 terlihat bahwa capaian kinerja indikator Indeks Survei Kepuasan Masyarakat pada Unit

Pelayanan Publik Tahun 2020 adalah sebesar 80,98 dari target 83 dengan tingkat capaian sebesar 97,57 persen berarti target “tidak tercapai”. Walaupun demikian tingkat pencapaian target Tahun 2020 meningkat dari pencapaian tahun 2019 yaitu 95.88 persen.

Ketidak berhasilan pencapaian target kinerja disebabkan antara lain karena :

- 1) Sosialisasi langsung kepada UPP baik mengenai peraturan perundang-undangan SKM maupun teknis penyusunan laporan tidak dapat dilakukan karena pemotongan anggaran (Refocusing) dan pembatasan kegiatan pertemuan langsung yang melibatkan orang banyak selama masa pandemi covid-19 pada Tahun 2020. oleh sebab itu, disampaikan berupa SE Bupati tentang Pelaksanaan Dan Pelaporan Skm Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka Barat kepada seluruh UPP di Lingkungan Kabupaten Banhgka Barat.;
- 2) Selama masa pandemi covid-19 pada Tahun 2020, banyak terjadi pembatasan aktifitas kerja yang juga berdampak kepada aktivitas pelayanan, seperti pelaksanaan WFH dan Isoman bagi pegawai tertentu, sehingga mempengaruhi kinerja pelayanan UPP;
- 3) Beberapa UPP vital pada tahun 2020 juga harus penutupan kantor atau pelayanan selama kurang lebih 14 hari saat terdapat pegawainya yang terindikasi positif covid, seperti PKM Simpang Teritip, PKM Tempilang, PKM Kelapa, PKM Muntok, PKM Jebus, dan RSUD Sejiran Setason. sehingga hal ini mempengaruhi kepuasan masyarakat terhadap pelayanan terutama dari unsur waktu pelayanan, hal ini ditunjukan dengan unsur waktu pelayanan sebagai unsur terendah terbanyak pada SKM Kabupaten BAngka BArat tahun 2020.

Dan jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Tahun 2020 menurun dari tahun 2018 namun meningkat dari Tahun 2019 sebagai mana ditampilkan pada Tabel 3.15 di bawah ini :

Tabel 3.15.
Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Tahun 2018 s/d 2020

No .	Nama Unit Pelayanan	SKM 2018	SKM 2019	SKM 2020
1	Dinas Kesehatan	80,35	76,12	77,37
2	Dinas Pencatatan Sipil dan Kependudukan	77,98	85,00	74,41
3	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	82,06	81,30	81,41
4	Dinas pengelolaan Pajak dan Retaribusi Daerah	79,44	81,84	82,1
5	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, P3A	81,07	81,03	86,62
6	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	0	88.29	87,41
7	Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat	98,72	85,95	82,10
8	RSUD Sejiran Setason	73,27	74,81	76,82
9	Kecamatan Muntok	81,81	81,86	81,90
10	Kecamatan Simpang Teritip	83,77	84,78	85,48
11	Kecamatan Kelapa	80,67	80,72	80,75
12	Kecamatan Jebus	81,27	81,49	81,49

13	Kecamatan Parittiga	80,25	82,75	80,05
14	Kecamatan Tempilang	86,7	88,70	75,97
15	Puskesmas Muntok	74,27	78,75	78,42
16	Puskesmas Simpang Teritip	84,41	74,40	79,90
17	Puskesmas Kelapa	81,88	81,90	82,12
18	Puskesmas Sekarbiru	81,71	81,76	81,87
19	Puskesmas Puput	90,06	77,96	74,89
20	Puskesmas Tempilang	78,46	80,16	80,49
21	Puskesmas Jebus	84,88	77,34	83,25
22	Puskesmas Kundi	70,22	67,36	75,07
	RATA-RATA NILAI SKM PER TAHUN	81,58	76,64	80,98

3.2.4.2. Indikator Kinerja “Persentase perangkat daerah yang tatalaksananya baik”

Berdasarkan Laporan Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Ketatalaksanaan di Kabupaten Bangka Barat Tahun 2020 yang dilakukan oleh Bagian Organisasi dan Reformasi Birokrasi Sekretariat Kabupaten Bangka Barat, dari 30 Perangkat Daerah yang diberikan kuesioner hanya 25 Perangkat Daerah yang menyampaikan kembali kuesioner tersebut dengan rincian hasil sebagai berikut:

Tabel 3.16.

Daftar Penilaian Ketatalaksanaan Perangkat Daerah Tahun 2020

No	OPD	Nilai	Kriteria
1.	Sekretariat Daerah	32,5	Kurang
2.	Sekretriat Dewan	35.0	Kurang
3.	Inspektorat	42,5	Cukup
4.	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Bangka Barat	80,0	Baik
5.	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Bangka Barat	90,0	Sangat Baik
6.	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Perhubungan Kab. Bangka Bara	40,0	Kurang
7.	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Bangka Barat	77,5	Baik
8.	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kab. Bangka Barat	67,5	Baik
9.	Dinas Kesehatan Kab. Bangka Barat	30,5	Kurang
10.	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Bangka Barat	22,5	Kurang
11.	Dinas Pengendalian, Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak Kab. Bangka Barat	25,0	Kurang
12.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Bangka Barat	27,5	Kurang

13.	Dinas Pertanian dan Pangan Kab. Bangka Barat	37,5	Kurang
14.	Dinas Lingkungan Hidup Kab. Bangka Barat	25,0	Kurang
15.	Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Bangka Barat	27,5	Kurang
16.	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah;	37,5	Kurang
17.	Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah;	55,5	Cukup
18.	Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian dan Pengembangan Daerah.	55,5	Cukup
19.	Kecamatan Muntok;	75,0	Baik
20.	Kecamatan Simpang Teritip;	55,0	Cukup
21.	Kecamatan Jebus;	32,5	Kurang
22.	Kecamatan Parittiga;	70,0	Baik
23.	Kecamatan Kelapa;	85,0	Sangat Baik
24.	Kecamatan Tempilang.	87,5	Sangat Baik
25.	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	27,5	Kurang
Total		1.241,5	Cukup
Rata-rata		49,7	Cukup
Persentase PD tatalaksana Baik		$= (8/30) \times 100$ $= 26,67 \%$	

Berdasarkan Tabel 3.16 ada 8 (delapan) Perangkat Daerah yang memiliki nilai ketatalaksanaan yang baik/sangat baik atau sebesar 26,67 persen dari 30 Perangkat Daerah yang ada di Kab. Bangka Barat, dengan demikian target kinerja Tahun 2020 yaitu “Persentase perangkat daerah yang tata laksanaanya baik sebesar 90 persen “Tidak tercapai”.

Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, capaian kinerja indikator Persentase perangkat daerah yang tata laksanaanya baik mengalami peningkatan baik dari Tahun 2018 maupun Tahun sebagaimana ditampilkan pada Tabel 3.17.

Tabel 3.17
 Nilai Ketatalaksanaan Perangkat Daerah Tahun 2018 s/d 2020

No.	Nama OPD	Jumlah Nilai Tahun 2018	Kategori Penilaian	Jumlah Nilai Tahun 2019	Kategori Penilaian	Jumlah Nilai Tahun 2019	Kategori Penilaian
1.	Sekretariat DPRD;	0	-	0	-	35.0	Kurang
2	Inspektorat Daerah;	87.5	Sangat Baik	33.0	Kurang	42,5	Cukup
3	Sekretariat Daerah	0		28.8	Kurang	32,5	Kurang
4	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	67.5	Baik	64.5	Cukup	67,5	Baik
5	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Perhubungan Kab. Bangka Barat	0	-	18.0	Kurang	40,0	Kurang
6	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan ruang	0	-	27.5	Kurang	27,5	Kurang

7	Dinas Pertanian dan Pangan	60.0	Cukup	38.5	Kurang	37,5	Kurang
8	Dinas Kelautan dan Perikanan	0	-	28.5	Kurang	27,5	Kurang
9	Dinas Lingkungan Hidup	0	-	37.0	Kurang	25,0	Kurang
10	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	75.0	Baik	64.5	Cukup	90,0	Sangat Baik
11	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	0	-	49.5	Kurang	22,5	Kurang
12	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	32.5	Kurang	57,5	Cukup	-	-
13	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah	0	-	54.0	Cukup	37,5	Kurang
14	Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah	0	-	57.5	Cukup	55,5	Cukup
15	Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah	0	-	50,5	Cukup	55,5	Cukup
16	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	0	-	61.0	Cukup	-	-
17	BP2KBP3A	0	-	36.0	Kurang	25,0	Kurang
18	Kecamatan Muntok	65.0	Baik	73.5	Baik	75,0	Baik
19.	Kecamatan Parittiga	57.5	Kurang	70.0	Baik	70,0	Baik
20.	Kecamatan Kelapa	72.5	Baik	88.5	Sangat baik	85,0	Sangat Baik
21.	Kecamatan Tempilang	65.0	Baik	64.5	Cukup	87,5	Sangat Baik
22.	Kecamatan Simp. Teritip	0	-	83.5	Baik	55,0	Cukup
23.	Dinas Kesehatan	0	-	46.5	Kurang	30,5	Kurang
24.	DPMNAKETRANS	0	-	11.0	kurang	77,5	Baik
25.	Kependudukan dan Pencatatan Sipil	-	-	-	-	80,0	Baik
26.	Kecamatan Jebus	-	-	-	-	32,5	Kurang
27.	Dinas Komunikasi dan Informatika	-	-	-	-	-	-
28.	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian	-	-	-	-	-	-
29.	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	-	-	-	-	-	-
30	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-	-	-	-	-	-
Persentase PD tatalaksana Baik		= (6/30)x100 = 20 %		= (4/30)x100 = 13,33 %		= (8/30)x100 = 26,67 %	

Berdasarkan Tabel 3.17 terlihat bahwa ada 4 (empat) Perangkat Daerah yang belum pernah sama sekali menyampaikan hasil kuesioner sejak Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2020, sehingga untuk Tahun 2021 masih dimungkinkan untuk melakukan perbaikan kinerja indikator Persentase perangkat daerah yang tata laksanaanya baik.

Beberapa faktor yang menjadi penyebab tidak tercapainya target kinerja diuraikan sebagai berikut:

1. Sosialisasi langsung kepada OPD mengenai ketatalaksanaan terutama tata naskah kedinasan tidak dapat dilakukan karena terjadi pemotongan anggaran (*Refocusing*) dan pembatasan kegiatan pertemuan langsung yang melibatkan orang banyak selama masa pandemi covid-19 pada tahun 2020.
2. Dengan adanya Covid 19 juga mempengaruhi gerak Bagian Organisasi dan RB untuk dapat langsung memonitoring OPD dalam pembuatan Tata Naskah Kedinasan;
3. Masih ada OPD dalam membuat Tata Naskah Dinas yang belum mengacu pada Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Barat dan Keputusan Bupati Bangka Barat Nomor 188.45/559/1.20.03.10/2015 tentang Petunjuk Teknis Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka Barat, sehingga format tata naskah dinas berbeda-beda, baik size, font, paragraf dll dan belum sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
4. Pegawai yang membidangi urusan administrasi persuratan belum dapat diberikan pelatihan mengenai tata naskah kedinasan dan masih terdapat penggantian pegawai jangka waktu yang terlalu singkat sehingga mempengaruhi konsistensi penyusunan naskah kedinasan OPD;

Beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk memperbaiki kinerja indikator “Persentase perangkat daerah yang tata laksanaanya baik” adalah sebagai berikut:

1. Penyebarluasan informasi mengenai aturan tata naskah kedinasan kepada seluruh OPD;
2. Melaksanakan sosialisasi aturan mengenai tata naskah kedinasan kepada OPD;
3. Berkoordinasi dengan OPD terkait penyusunan naskah kedinasan di OPD;
4. Penyampaian hasil monitoring dan evaluasi ketatalaksanaan per masing-masing OPD dalam bentuk rekomendasi yang ditujukan kepada kepala OPD sebagai pedoman dalam penyusunan tata naskah kedinasan selanjutnya.

Adapun upaya yang harus dilakukan oleh Perangkat Daerah adalah sebagai berikut:

1. Melakukan sosialisasi internal mengenai aturan tata naskah kedinasan, agar diketahui dan dipedomani oleh seluruh pegawai di lingkungan OPD yang bersangkutan;
2. Menyusun kebijakan pimpinan mengenai penyeragaman format penyusunan naskah kedinasan OPD;

3. Pegawai yang membidangi urusan administrasi persuratan diberikan pelatihan dan disarankan untuk tidak dipindahtugaskan dalam jangka waktu yang terlalu singkat.

3.2.4.3. Indikator Kinerja “Nilai Evaluasi Kinerja BUMD”

Nilai Evaluasi Kinerja BUMD diperoleh dari Laporan Evaluasi Kinerja yang dilakukan oleh BPKP Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Pada Tahun 2020 penilaian kinerja terhadap BUMD di Kab. Bangka Barat hanya dilakukan terhadap PDAM Tirta Sejiran Setason.

Berdasarkan Laporan Evaluasi Kinerja yang dilakukan oleh BPKP Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung No. LEV- 372/PW29/4/20209 Tanggal 30 Juli 2020 nilai evaluasi kinerja PDAM Tirta Sejiran Setason Tahun 2020 adalah 61,20 meningkat 3,21 point dari Tahun 2019 yaitu 57, 99 sehingga tingkat capaian kinerja sebesar 103,73 persen.

Berdasarkan Tabel 3.13 dari target 59 capaian realisasi Tahun 2020 adalah sebesar 61,22 dengan tingkat capaian 103,73 persen yang berarti target tercapai. Hal ini berdasarkan hasil evaluasi BPKP tersebut dikarenakan PDAM adanya perbaikan pada rasio laba terhadap penjualan, meningkatnya cakupan pelayanan, membaiknya tingkat kehilangan air dan meningkatnya rasio karyawan terhadap 1000 pelanggan.

Beberapa rekomendasi dari hasil evaluasi kinerja yang disampaikan oleh BPKP adalah sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan pendapatan operasional dan melakukan efisiensi biaya;
- 2) Memanfaatkan dana yang tersedia untuk menambah jaringan distribusi;
- 3) Meningkatkan jam operasi pelayanan untuk pelanggan di wilayah Terabek, Parit Tiga dan Tempilang;
- 4) Melakukan pengawasan uji kualitas air distribusi dengan mempertimbangkan penetapan lokasi titik pengambilan sampel, penetapan jumlah sampel dan frekuensi pengambilan sampel;
- 5) Meningkatkan cakupan pelayanan dengan merealisasikan tambahan pemasangan sambungan baru;
- 6) Menyusun rencana pengamananan air minum (RPAM) sesuai dengan pedoman penyusunan RPAM dari Kementerian PUPR;
- 7) Mengajukan kembali permohonan kepada Bupati Bangka Barat dalam mengupayakan serah terima kepemilikan asset yang berasal dari APBN dan APBD yang telah digunakan dalam operasional dan belum ditetapkan statusnya, dalam penyertaan modal PDAM;

- 8) Mengusulkan klasifikasi tarif untuk pelanggan non niagra atau rumah tangga kepada Bupati Bangka Barat;
- 9) Melakukan strategi pengamanan sumber air dan mencari opsi sumber air baru;
- 10) Menyelesaikan dan mempercepat proses pengurusan hak kepemilikan tanah/lahan Kolong menjelang dan Kolong Alang yang menjadi sumber air baku perusahaan;
- 11) Berkoordinasi dengan pihak terkait untuk menertibkan tambang timah ilegal yang beroperasi di wilayah sumber air baku;
- 12) Melakukan pemeriksaan secara berkala terhadap jaringan pipa distribusi untuk mendeteksi kebocoran pada jaringan pipa distribusi, dan segera melakukan perbaikan apabila terdapat jaringan pipa yang rusak;
- 13) Melakukan pemeriksaan dan peneraan meter air induk di instalasi produksi dan distribusi secara berkala;
- 14) Melakukan pemeriksaan dan peneraan secara berkala di meter air pelanggan, dan segera melakukan penggantian apabila dijumpai adanya meter air yang rusak atau kurang akurat;
- 15) Mengoptimalkan peran pencatat meter air dalam melaksanakan tugasnya sesuai ketentuan peraturan perusahaan yang berlaku.

Jika dibandingkan dengan capaian akhir Renstra, tingkat capaian kinerja Sasaran “Terpenuhinya kualitas tatalaksana dan pelayanan publik pemerintah daerah” Tahun 2020 dengan rata-rata tingkat capaian sebesar 83,38 persen (< 90 prsen) maka dapat disimpulkan bahwa diperlukan upaya lebih untuk mencapai target akhir renstra. Berdasarkan Tabel 3.12 terlihat bahwa tingkat capaian yang sangat rendah yaitu indikator “Persentase Perangkat Daerah yang Tatalaksananya Baik” dengan tingkat capaian sangat rendah sebesar 52,32 persen.

Tabel 3.18.

Capaian Indikator Kinerja Sasaran “Terpenuhinya kualitas tatalaksana dan pelayanan publik pemerintah daerah” Tahun 2020 terhadap Target Akhir Renstra

INDIKATOR KINERJA SASARAN	SATUAN	REALISAS I TAHUN 2019	TARGET AKHIR RENSTRA	%	STATUS CAPAIAN
Survey kepuasan masyarakat (SKM) atas pelayanan publik	Nilai	80,71	85	94,95	Optimis Tercapai
Persentase perangkat daerah yang tatalaksananya baik	Persen	49,7	95	52,32	Perlu upaya lebih
Nilai Evaluasi Kinerja BUMD	Nilai	61,2	59,5	102,86	Optimis Tercapai

Rata-Rata	83,38	Perlu upaya lebih
-----------	-------	-------------------

Dalam pencapaian sasaran Terpenuhinya kualitas tatalaksana dan pelayanan publik pemerintah daerah, program yang dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Bangka Barat adalah sebagai berikut:

1. Program Penataan dan Penguatan Kelembagaan ;
2. Program Penataan dan Penguatan Ketatalaksanaan;
3. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik;
4. Program Pembinaan BUMD;

3.2.5 Sasaran Strategis “Tersedianya Regulasi Daerah Yang Memadai”

Sasaran strategis Tersedianya Regulasi Daerah Yang Memadai di ukur dengan indikator kinerja Persentase regulasi daerah yang ditetapkan sesuai dengan amanat peraturan diatasnya. Regulasi daerah yang dimaksud adalah Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Kepala Daerah / Bupati (Perbup).

Pada Tahun 2020 Perda dan Perbup yg ditargetkan pada APBD 2020 sebanyak 14 Perda dan 99 Perbup dan sampai dengan akhir tahun 2020 realisasi Perda dan Perbup sebanyak 13 Perda dan 81 Perbup, sehingga capaian kinerja indikator Persentase regulasi daerah yang ditetapkan sesuai dengan amanat peraturan diatasnya 83,19 persen, capaian ini menurutn dari capaian Tahun sebelumnya yaitu 93,27 persen dan status capaian “Tidak tercapai” sebagaimana ditampilkan pada Tabel 3.19.

Tabel 3.19
Capaian Indikator Kinerja Sasaran
Tersedianya Regulasi Daerah Yang Memadai

INDIKATOR KINERJA SASARAN	SATUAN	REALISASI TAHUN 2019	TARGET TAHUN 2020	REALISASI TAHUN 2020	%	STATUS CAPAIAN
Persentase regulasi daerah yang ditetapkan sesuai dengan amanat peraturan diatasnya	Persen	93,27	100	83,19	83,19	Tidak Tercapai

Tidak tercapainya target yang ditetapkan karena sampai dengan akhir tahun terdapat 1 (satu) Rancangan Perda dan 18 (delapan belas) Rancangan Perbup yang tidak ditetapkan yaitu sbb:

I. RAPERDA (1): Raperda tentang Retribusi Izin Usaha Perikanan

Raperda tentang Retribusi Izin Usaha Perikanan masih dalam tahapan evaluasi oleh Kementerian Dalam Negeri sesuai dengan Permendagri Nomor 80 Tahun 2015 tentang

Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 180 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Permendagri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.

II. RAPERBUP (14):

NO	TENTANG	ALASAN
1.	Kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja dinas lingkungan hidup daerah	Perubahan judul raperbup terkait menjadi perubahan atas karena materi tidak berubah lebih dari 50%
2.	Penyesuaian Nomenklatur dan struktur organisasi badan kesbagpol kab. babar	Draf raperbup masuk ke bagian hukum, dilakukan koreksi dan koordinasi dengan OPD pemrakarsa, namun sampai dibuatnya laporan ini belum dapat ditetapkan karena : 1. Tidak siapnya OPD pemrakarsa terhadap materi raperbup 2. Tidak disetujui oleh pimpinan daerah 3. Masih dalam tahapan perbaikan oleh OPD pemrakarsa
3.	Rincian tugas, fungsi dan tata kerja BPBD Kabupaten Bangka Barat	
4.	Juknis pengujian berkala kendaraan bermotor dan penilaian teknis kendaraan bermotor di kab. babar	
5.	Perubahan atas perbup nomor 81 tahun 2017 tentang organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja upt BP2RD kab. babar	
6.	Perubahan atas perbup nomor 12 tahun 2020 tentang pemberian tambahan penghasilan pegawai asn di pemkab. babar	
7.	Pedoman penerimaan peserta didik baru pada paud/tk, sekolah dasar dan sekolah menengah pertama kab. Babar tahun pelajaran 2020/2021	
8.	Pelaksanaan perda nomor 10 tahun 2019 tentang pengelolaan zakat	
9.	Tata cara pengisian keanggotaan BPD	
10.	Tata cara pemberian uang pembinaan kepada desa atau kelurahan penerima penghargaan pbb perdesaan dan perkotaan untuk tahun pajak 2020	
11.	Penyelenggaraan Pendidikan anti korupsi pada satuan Pendidikan	
12.	Pedoman penyusunan, pengajuan, penetapan dan perubahan rencana bisnis anggaran blud pada rsud sejiran setason Kab. Babar.	
13.	Pedoman pelaksanaan APBD Kab. Babar Tahun Anggaran 2021	Draf raperbup masuk ke bagian hukum tahun 2020 dan telah ditetapkan di tahun 2021
14.	Perubahan atas perbup nomor 71 tahun 2016 tentang kedudukan, susunan, organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja upt BP2RD kab. babar	Draf raperbup masuk ke bagian hukum tahun 2020 dan telah ditetapkan di tahun 2021

Jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, terjadi penurunan capaian kinerja untuk Tahun 2020, sehingga diperlukan upaya-upaya untuk mengantisipasi hal-hal yang mungkin menjadi kendala dalam pencapaian indikator kinerja seperti upaya yg lebih optimal dalam hal koordinasi dengan Perangkat Daerah pengusung regulasi dan dengan pihak legislatif sehingga faktor-faktor teknis yang menjadi penghambat dapat diminimalisir sekecil mungkin.

Apabila disandingkan dengan target akhir Renstra, sebagaimana ditampilkan pada Tabel 3.20, dengan tingkat capaian 83,19 persen (< 90 persen) maka masih diperlukan upaya yang lebih untuk mencapai indikator kinerja Persentase regulasi daerah yang ditetapkan sesuai dengan amanat peraturan diatasnya optimis pada akhir Renstra.

Tabel 3.20.
 Capaian Indikator Kinerja Sasaran “Tersedianya Regulasi Daerah Yang Memadai” Tahun 2020
 terhadap Target Akhir Renstra

INDIKATOR KINERJA SASARAN	SATUAN	REALISASI TAHUN 2020	TARGET AKHIR RENSTRA	%	STATUS CAPAIAN
Persentase regulasi daerah yang ditetapkan sesuai dengan amanat peraturan di atasnya	Persen	86,73	100	86,7 3	Perlu upaya lebih

Dalam pencapaian sasaran Sasaran “Tersedianya Regulasi Daerah Yang Memadai” Tahun 2020 terhadap Target Akhir Renstra, program yang dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Bangka Barat adalah Program Penataan Peraturan Perundang-undangan;

3.3. Capaian Perjanjian Kinerja Eselon II b, III dan IV Tahun 2019

Penghitungan capaian kinerja Eselon III dan IV Tahun 2020 dilakukan berdasarkan Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2020 setelah dilakukannya Perubahan APBD Tahun 2020.

Perjanjian Kinerja eselon III berdasarkan sasaran dan target program sedangkan Perjanjian Kinerja eselon IV berdasarkan sasaran dan target kegiatan. Target, Capaian Kinerja dan analisis terhadap capaian indikator kinerja masing-masing eselon ditampilkan pada Tabel 3.21.

Tabel 3.21.
Target, Capaian Kinerja Dan Analisis Terhadap Capaian Kinerja Eselon IIb, III dan IV

No	Jabatan	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2020	Realisasi	Tingkat & Status Capaian	Data/Perhitungan	Keterangan
I.	Asisten Pemerintah an dan Sosial	1. Efektifnya pelaksanaan Pemerintahan	Persentase capaian keberhasilan program-program pemerintahan		100 %	100 %	51,33% (tidak tercapai)	Dihitung dari rata-rata capaian program-program Kabag Pemerintahan	
		2. Optimalnya Koordinasi sosial kemasyarakatan	Persentase capaian keberhasilan program-program sosial kemasyarakatan		100 %	100%	100% (tercapai)	Dihitung dari rata-rata capaian program-program Kabag Sosial dan Kemasyarakatan	
I.1.	Kabag Pemerintah an	Tertibnya Batas Wilayah di Kab. Bangka Barat	Terciptanya tertib batas antar desa/kelurahan di Kab. Bangka Barat	Persen	100	Tidak ada penetapan batas	0 % (tidak tercapai)		Penetapan batas desa/kelurahan telah selesai dilaksanakan dan telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati. Penegasan batas desa/kelurahan direncanakan pemasangan pilar sebanyak 502. Realisasi pemasangan dari 2016 sampai dengan 2018 dilaksanakan sesuai dengan target dengan pertahunnya 115 pilar. Pada tahun 2019 dan 2020 pemasangan pilar batas tidak sesuai target dikarenakan adanya penolakan dari salah satu desa yang berbatasan yang dikhawatirkan akan menimbulkan komplik di lapangan. Pada tahun 2020 dilakukan kegiatan fasilitasi dan sosialisasi terkait dengan penyelesaian sengketa batas tersebut. Sampai saat ini masih tersisa 52 pilar batas yang belum terpasang mencakup 11 desa di Kecamatan Parittiga, Muntok dan Simpang Teritip.
		Optimalnya Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Integritas Pelayanan Publik	nilai	7	Tidak ada data	0 % (tidak tercapai)	Tidak ada nilai	
		Meningkatnya kerjasama pembangunan antar daerah	Terjalinnnya kerjasama pembangunan antar daerah	MoU	15	23	153,33 (tercapai)		

I.1.2	Kasubag penataan dan batas wilayah	Fasilitasi penyelesaian batas wilayah	Fasilitasi penyelesaian batas wilayah dan sosialisasi	kali	2	2	100% (tercapai)		
		Tersedianya dokumen rupabumi	Cakupan perangkat daerah yang memiliki keakuratan data dan informasi	Dokumen /Softcopy /Shape File (SHP)	1	1	100% (tercapai)		
I.1.3	Kasubag Otonomi daerah dan kerjasama	Meningkatnya persentase kerjasama antar daerah	Adanya kerjasama yang terjalin antar daerah	MoU	15	23	153% (tercapai)		
		Meningkatnya pelaporan SPM Kabupaten	Tersedianya dokumen SPM Kabupaten	Dokumen	1	1	100% (tercapai)		
		Meningkatnya pelayanan PATEN sesuai dengan SOP yang berlaku	Terlaksananya pelayanan PATEN sesuai dengan SOP yang berlaku	Kecamatan	6	6	100% (tercapai)		
		Meningkatnya koordinasi antar Pejabat Pemerintahan Daerah	Terlaksananya rapat koordinasi pejabat Pemerintahan Daerah	Kali	3	3	100% (tercapai)		
		Meningkatnya pelaksanaan koordinasi antar Forum Komunikasi Pimpinan Daerah	Terlaksananya rapat Koordinasi Pejabat Forum Komunikasi Pimpinan Daerah	Kali	4	4	100% (tercapai)		
		Meningkatnya pelaksanaan rapat Bina Pamong	Terlaksananya Rapat Bina Pamong	Kali	14	12	86% (tidak tercapai)		
		Meningkatnya Peringkat Kabupaten Bangka Barat LPPD Tk. Provinsi	Tersusunnya LPPD Pemerintahan Kabupaten Bangka Barat	Dokumen (35 buku)	1	1	100% (tercapai)		
		Meningkatnya keterkaitan program prioritas Kepala Daerah dengan arah	Tersusunnya LKPJ Kepala Daerah	Dokumen	1	1	100% (tercapai)		

		kebijakan Pemerintah Daerah							
I.2.	Kabag Sosial dan Kemasyarakatan	Harmonisnya Kehidupan beragama dan peningkatan kualitas SDM di Kab. Bangka Barat	Persentase partisipasi masyarakat dalam pembangunan yang ditindaklanjuti	persen	100	100	100% (tercapai)		
			Meningkatnya Pembinaan Kehidupan Beragama	persen	100	100	100% (tercapai)		
			Cakupan fasilitasi pembinaan dan kemsyarakatan	persen	100	100	100% (tercapai)		
I.2.1	Kasubbag Agama dan Kebudayaan	Meningkatnya kualitas kehidupan bersama	Jumlah Dai yang melakukan pembinaan di tiap desa	Orang	40	40	100% (tercapai)		
			Tersedianya STQ / MTQ Kab. Bangka Barat	Cabang	28	28	100% (tercapai)		
			Tersedianya Operasional Masjid Agung Baiturridho	bulan	12	12	100% (tercapai)		
			Jumlah Kontingen dan Cabang STQ yang diikuti dalam 1 tahun	Orang	50	50	100% (tercapai)		
			Jumlah Qori - Qoriah yang dibina untuk mengikuti STQ / MTQ tk. Propinsi	Orang	36	36	100% (tercapai)		
			Terlaksana Safari Ramadhan	desa	12	0	0% (tidak tercapai)		
I.2.2	Kasubbag. Kemasyarakatan	Tertibnya Pelaksanaan Kegiatan Peringatan Hari Besar Islam	Tersedianya operasional PHBI	hari besar	7	1	14% (tidak tercapai)		Hanya 1 Hari Besar yang dilaksanakan, 6 Hari besar tidak dilaksanakan karena adanya Pandemi Corona (Covid 19)
I.2.3	Kasubbag.	Tepatnya sasaran	Jumlah survey dan	proposal	100	100	100%		

	Sosial	pemberian Bantuan Sosial dan Bantuan Hibah	monitoring yang dilaksanakan di Tiap Desa				(tercapai)		
			Terselenggaranya Sosialisasi kepada Masyarakat, Perangkat Desa, Lembaga Keagamaan	kecamatan	6	6	100% (tercapai)		
II.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan	1. Optimalnya Koordinasi Perekonomian dan Pembangunan	Persentase capaian keberhasilan program program Perekonomian dan Pembangunan		100 %	96,82%	96,82% (tidak tercapai)	Dihitung dari rata-rata capaian program-program Kabag Perekonomian dan Pembangunan	
		2. Optimalnya Koordinasi Layanan Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase capaian keberhasilan Program-program Layanan Pengadaan Barang dan Jasa		100 %	100 %	100% (tercapai)	Dihitung dari rata-rata capaian program-program Kabag Pengadaan Barang dan Jasa	
II.1	Kabag Perekonomian dan Pembangunan	1. Optimalnya Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Status capaian kinerja keuangan		100%	90,45%	90,45% (Tidak Tercapai)	Data status capaian kinerja keuangan Pemkab Bangka Barat di ambil dari Data Aplikasi eMonev Tepra LKPP, dimana data realisasi kinerja maupun keuangan setiap Perangkat Daerah dan Pemkab Bangka Barat diupdate setiap bulan dari Januari sampai dengan tgl 31 Desember 2020, rata-rata status capaian keuangan Pemkab Bangka Barat Tahun 2019 yang tertera pada aplikasi adalah sebesar 90,45 persen, dengan rincian sbb:	Tidak tercapainya target indikator kinerja Status capaian kinerja keuangan sebesar 100% hal ini selain disebabkan oleh efisiensi belanja (selisih kontrak dg hps/selisih harga belanja langsung) juga disebabkan oleh tidak terlaksananya / tertunda beberapa kegiatan pada Perangkat Daerah antara lain seperti : Pada Dinas Pendidikan (ada 3 kegiatan gagal tender) dan Dinas Pekerjaan Umum (ada 1 kegiatan gagal tender, 1 kegiatan tidak terlaksana dan 2 kegiatan yang hanya sebagian yang terlaksana)
		2. Sinkronnya kebijakan pembangunan dan Perencanaan	Pengembangan kebijakan pembangunan sesuai dengan Perencanaan		100%	100%	100% (tercapai)	Indikator kinerja sasaran “Pengembangan kebijakan pembangunan sesuai dengan perencanaan” yang dilaksanakan oleh Kabag Ekbang didefenisikan sebagai kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan/dilaksanakan sesuai dengan 3 (tiga) kegiatan yang ada pada Program Pengembangan Kebijakan Perekonomian dan Pembangunan yaitu :	

								Kegiatan Penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial Kegiatan Penyelenggaraan Tim Pengendalian Inflasi Daerah Tim Evaluasi Pengawasan Penyerapan Realisasi Anggaran (TEPRA) Pada Kegiatan Kegiatan Penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial dilakukan pemantauan penyaluran Dana CSR perusahaan² yang ada di Kabupaten Bangka Barat setiap Triwulan dan telah di tetapkan Perda tentang Penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan; Pada Kegiatan Kegiatan Penyelenggaraan Tim Pengendalian Inflasi Daerah dilaksanakan melalui koordinasi kebijakan yang difokuskan pada empat program yaitu: Keterjangkauan Harga, Ketersediaan Pasokan, Kelancaran Distribusi, dan Komunikasi yang Efektif (4K) dengan Perangkat Daerah/institusi terkait; Pada Kegiatan Tim Evaluasi Pengawasan Penyerapan Realisasi Anggaran (TEPRA) dilakukan pemantauan rutin penyerapan anggaran dan realisasi fisik kegiatan untuk mengendalikan pelaksanaan kegiatan agar sesuai dengan yang direncanakan.	
		3. Optimalnya Kinerja BUMD	Terbinanya BUMD		100%	100%	100% (tercapai)	Jumlah BUMD yang dibina dibagi Jumlah BUMD yang ada di Kabupaten Bangka Barat dikali 100 Jumlah BUMD yang ada di Bangka Barat : 2 Jumlah BUMD yang dibina : 2 = $\frac{2}{2} \times 100 = 100 \%$	Pembinaan BUMD sesuai yang diamanatkan oleh PP 54 Tahun 2017 yaitu pembinaan organisasi, manajemen, dan keuangan; pembinaan kepengurusan; pembinaan pengembangan bisnis; monitoring dan evaluasi, administrasi pembinaan dan fungsi lain yang diberikan oleh sekda.

									BUMD yang ada di Bangka Barat yaitu Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Sejiran Setason (PDAM TSS) dan BUMD Bangka Barat Sejahtera (BBS). Sampai Tahun 2020 Kondisi PDAM TSS baik, hasil penilaian oleh BPKP tingkat kesehatan mendapatkan kategori “sehat” dan nilai kinerja “cukup”. Sedangkan BUMD BBS pada Tahun 2020 telah dilaksanakan Analisa Kebutuhan Daerah dan Kelayakan Usaha BUMD BBS sebagai dasar Kepala Daerah terpilih untuk mengambil kebijakan selanjutnya
II.1.1	Kasubbag Perencanaan dan Pelaporan	Tersusunya Renstra, Renja dan RKA Setda	Jumlah dokumen tersusun		3 jenis	3 jenis	100 % (tercapai)		
		Tersusunya Pelaporan LAKIP, LKPI, TAP KIN, dan LPPD SETDA	Jumlah dokumen tersusun		3 jenis	3 jenis	100 % (tercapai)		
		Tersusunya Laporan Pengendalian dan Evaluasi (Dalev) SETDA	Jumlah dokumen tersusun		4 Jenis	4 Jenis	100 % (tercapai)		
II.1.2	Kasubbag Bagian Pengendalian Kebijakan Perekonomian dan Pembangunan	Optimalnya Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi terhadap BUMD	Tersedianya Dokumen Evaluasi Kinerja BUMD per triwulan		4 Dokumen	3 dokumen	75 % (tidak tercapai)		
		Terselenggaranya Tim Pengendalian Inflasi daerah	Tersedianya data inflasi di Kabupaten Bangka Barat		1 Dokumen	1 Dokumen	100 % (tercapai)		
		Tertibnya Penyelenggaraan Perusahaan di	Tersedianya Laporan Tanggungjawab Sosial (CSR)		4 Dokumen	4 Dokumen	100 % (tercapai)		

		Kabupaten Bangka Barat	Perusahaan yang ada di kabupaten Bangka Barat						
II.1.3	Kasubbag Pemantauan dan Evaluasi Kebijakan Perekonomian dan Pembangunan	Optimalnya Evaluasi dan Pengawasan Penyerapan Realisasi Anggaran Daerah (TEPRA) dan Pengendalian Pembangunan	Terlaksananya Rapat TEPRA		12 bulan	4 bulan	33 % (tercapai)		Rapat Teptra tidak dilakukan rutin selama 12 bulan dikarenakan pandemic covid-19, namun evaluasi dan pemantauan bulanan dan laporan kepada KDH dilakukan secara rutin
II.2	Kabag Pengadaan Barang dan Jasa	Optimalnya Penggunaan e-procurement terhadap belanja pengadaan	Penggunaan e-procurement terhadap belanja pengadaan	persen	100%	100	100% (tercapai)		
II.2.1	Kasubag Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Optimalisasi Paket Pengadaan Barang/Jasa	Dokumen pelaksanaan pengadaan yang ditindak lanjuti	persen	100	100	100% (tercapai)		
II.2.2	Kasubag Pembinaan dan Advokasi PBJ	Terukurnya tingkat kematangan UKPBJ	Jumlah aplikasi pengukuran tingkat kematangan UKPBJ yang dikelola	aplikasi	1	1	100% (tercapai)		
II.2.3	Kasubag Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Optimalnya paket pengadaan barang/jasa yang diproses secara elektronik	Jumlah Paket Pengadaan barang/jasa yang diproses secara elektronik	paket	120	42	35% (tidak tercapai)		
III.	Asisten Administrasi dan Umum	1. Optimalnya Koordinasi dan Fasilitasi Produk Hukum Daerah	Persentase Capaian Keberhasilan Program Program Fasilitasi Produk Hukum Daerah		100 %	86,73 %	86,73 % (Tidak Tercapai)	Dihitung dari capaian program Kabag Hukum	
		2. Optimalnya Koordinasi bidang	Persentase Capaian Keberhasilan Program- program		100 %	110,86%	110,86% (tercapai)	Dihitung dari rata-rata capaian program-program Kabag Organisasi dan Reformasi Birokrasi	

		Organisasi, Reformasi dan Birokrasi	Organisasi Reformasi Birokrasi						
		3. Optimalnya Koordinasi Administrasi dan Umum	Persentase capaian keberhasilan program program umum perlengkapan dan protokol		100 %	94,94 %	94,94 % (tercapai)	Dihitung dari rata-rata capaian program-program Kabag Umum Perlengkapan dan Protokol	
III.1	Kabag Hukum	Tersedianya Cakupan rancangan regulasi daerah menjadi regulasi daerah	Cakupan rancangan regulasi daerah menjadi regulasi daerah		100%	86,73%	86,73% (tidak tercapai)		
III.1.1	Kasubbag. Penyuluhan, Bantuan Hukum Dan Ham	Tersedianya bantuan terhadap permasalahan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bantuan terhadap permasalahan Peraturan Perundang-undangan		1 Kasus/ Tahun	1 kasus	100% (tercapai)		
		Tersedianya Rancangan dan laporan kerja RANHAMDA yang tersusun	Jumlah Rancangan dan laporan kerja RANHAMDA yang tersusun		2 Laporan	2	100% (tercapai)		
III.1.2	Kasubbag. Pengkajian Dan Dokumentasi Hukum	Tersedianya Produk hukum yang terupdate melalui website JDIH	Jumlah Produk hukum yang terupdate melalui website JDIH		100	100	100% (tercapai)		
		Terlaksananya Pengawasan, Pengamanan, Monitoring dan Evaluasi Pemerintahan Daerah dan Desa	Jumlah Perangkat Daerah yang didampingi Tim Fasilitasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah		30 OPD	13	43,33 % (tidak tercapai)		
III.1.3	Kasubbag. Produk Hukum Daerah	Tersedianya Raperdes/Perdes yang di kaji	Jumlah Raperdes/Perdes yang di kaji		2 kali	2 kali	100% (tercapai)		

		Tersedianya Raperda dan Raperbub yang dibahas	Jumlah Raperda dan Raperbub yang dibahas		30 Raperbub dan 14 Raperda	14 dan 30	100% (tercapai)		
		Tersedianya Raperda yang sesuai dengan Instrumen HAM dan Peraturan Perundang - Undangan yang berlaku	Jumlah Raperda yang sesuai dengan Instrumen HAM dan Peraturan Perundang - Undangan yang berlaku		12 Raperda	11	91,67% (tidak tercapai)		
		Tersedianya produk hukum yang sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah produk hukum yang sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan		700 Produk Hukum	863	123,29% (tercapai)		
		Tersedianya Raperda yang tersusun dan terkelola	Jumlah Raperda yang tersusun dan terkelola		15 Raperda	12	80,00% (tercapai)		
		Tersedianya bantuan terhadap permasalahan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bantuan terhadap permasalahan Peraturan Perundang-undangan		1 Kasus/ Tahun	1 kasus	100% (tercapai)		
III.2.	Kabag Organisasi	Meningkatnya Sumber Daya Aparatur dalam Bekerja	Optimalisasi Sumber Daya Aparatur dalam Bekerja	Persen	100	100	100% (tercapai)		
		Tersedianya Perangkat Daerah yang tepat fungsi	Persentase Perangkat Daerah yang tepat Fungsi	Persen	63	90	142,68 (tercapai)		
		Tercapainya nilai sistem pelayanan publik	Nilai Sistem Pelayanan Publik	Persen	78	83.86	107,51% (tercapai)		
		Tersedianya Perangkat Daerah yang ketatalaksanaannya baik	Persentase Perangkat Daerah yang Ketatalaksanaannya dengan kriteria "BAIK"	Persen	53,4	49.71	93,09% (tidak tercapai)		Dari 30 OPD, terdapat 5 OPD yang tidak menyampaikan data dukung dan/atau form kuesioner monitoring evaluasi ketatalaksanaan ke Bagian

									Organisasi dan RB Setda. hingga batas waktu yang ditentukan.
III.2.1	Kasubbag. Tatalaksana dan Pelayanan Publik	Meningkatnya Inovasi Pelayanan Publik	Terasistensinya OPD	OPD	3	5	166,67% (tercapai)		
		Tertibnya pelaporan SKM pada unit pelayanan dan SKM Kabupaten	Tersedianya dokumen SKM Kabupaten	dokumen	1	1	100% (tercapai)		
		Terlaksananya Penilaian Penyelenggaraan Publik	Ternilainya unit pelayanan publik	OPD/UPP	19	19	100% (tercapai)		Pada tahun 2020 dilaksanakan 2 kali KIPP yaitu oleh Kemenpan dan RB dan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Pada KIPP Nasional yang diselenggarakan Kemenpan dan RB, ada 2 UPP yang terasistensi untuk ikut yaitu Inovasi dari Puskesmas Sekarbiru dan SMPN 1 Muntok, dan pada KIPP tingkat Provinsi, ada 3 UPP yang terasistensi untuk ikut yaitu Inovasi dari Puskesmas Kelapa, Puskesmas Muntok dan Puskesmas Sekarbiru.
		Meningkatnya kualitas ketatalaksanaan OPD	Termonitoring dan Terevaluasinya Ketatalaksanaan OPD	dokumen	1	1	100% (tercapai)		
		Tertibnya penyusunan SOP Perangkat Daerah	Terasistensinya penyusunan SOP OPD	dokumen	1	1	100% (tercapai)		
III.2.2	Sub Bagian Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Terlaksananya reformasi birokrasi di Kabupaten Bangka Barat	Tersusunnya laporan pelaksanaan reformasi birokrasi Kabupaten	dokumen	1	1	100% (tercapai)		
III.2.3	Kasubbag. Kelembaga	Terlaksananya pelaporan LHKPN	Jumlah asistensi yang dilaksanakan	kali	1	2	200% (tercapai)		Asistensi dilaksanakan terpisah untuk Wajib Lapor Periodik sebanyak 1 kali

	an dan ANJAB								dan Wajib Lapor Khusus sebanyak 1 kali.
		Tersedianya dokumen Job Grading di Pemkab Bangka Barat	Tervalidasinya dokem Job Grading di Pemkab Bangka Barat	dokumen	1	1			
		Tersedianya standar kompetisi jabatan untuk semua jabatan pada Perangkat Daerah	Tersusunya dokumen SKJ di Pemkab Bangka Barat	dokumen	1	1	100% (tercapai)		
		Tersusunya ANJAB dan ABK di Pemkab Bangka Barat	Tervalidasinya ANJAB dan ABK	dokumen	2	2	100% (tercapai)		
		Tersusunnya kebijakan dibidang kelembagaan	Tersusunnya kebijakan dibidang kelembagaan	kebijakan	6	6	100% (tercapai)		
III.3	Kabag Umum, Perlengkapn dan Protokol	Meningkatnya Tata Kelola Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pemenuhan layanan administrasi perkantoran	Persen	100	100	100% (tercapai)		
		Meningkatnya Tata Kelola Saraana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	Persen	100	89,34	89,34 (tidak tercapai)		
		Meningkatnya Kedisipinan Aparatur	Optimalnya disiplin aparatur	Persen	100	100	100% (tercapai)		
		Optimalnya Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Statur capaian kinerja keuangan	Persen	100	90,43	90,43 (tidak tercapai)		
III.3.1	Kasubbag Perlengkapn dan Keuangan	Meningkatnya Tata Kelola Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tersedianya sejumlah peralatan dan perlegkapan kantor	Jenis	6	6	100% (tercapai)		

		Meningkatnya Tata Kelola Sarana dan Prasarana Aparatur	Terpeliharanya Kendaraan Dinas/Operasional	Bulan	12	12	100% (tercapai)		
			Terpeliharanya Gedung Kantor	Bulan	12	12	100% (tercapai)		
		Meningkatnya Kedisipinan Aparatur	Jumlah Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Stel	24	24	100% (tercapai)		
		Optimalnya Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Jumlah dokumen tersusun	dokumen	1	1	100% (tercapai)		
			Jumlah dokumen tersusun	dokumen	2	2	100% (tercapai)		
			Jumlah dokumen tersusun	dokumen	2	2	100% (tercapai)		
			Jumlah dokumen tersusun	dokumen	1	1	100% (tercapai)		
III.3.2	Kasubbag Umum dan Rumah Tangga	Meningkatnya Tata Kelola Pelayanan Administrasi Perkantoran	Pembayaran Honorarium PHL	ob	720	720	100% (tercapai)		
			1. Tersedianya Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik	Bulan	12	12	100% (tercapai)		
			2. Pembayaran Honorarium PHL	ob	12	12	100% (tercapai)		
			Pembayaran Honorarium PHL	ob	96	96	100% (tercapai)		
			1. Pembayaran Honorarium PHL	ob	264	264	100% (tercapai)		
			2. Pembayaran STNK kendaraan dinas/operasional	unit	150	150	100% (tercapai)		
			Pembayaran	ob	96	96	100%		

			Honorarium PHL				(tercapai)		
			Pembayaran Honorarium PHL	ob	300	300	100% (tercapai)		
			Tersediaya alat tulis kantor	Bulan	12	12	100% (tercapai)		
			Tersedianya barang cetak penggandaan	Bulan	12	12	100% (tercapai)		
			Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Bulan	12	12	100% (tercapai)		
			Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Bulan	12	12	100% (tercapai)		
			Terpenuhinya Makanan dan Minuman	Bulan	12	12	100% (tercapai)		
			Terlaksananya Rapa-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah	Bulan	12	12	100% (tercapai)		
		Meningkatnya Tata Kelola Sarana dan Prasarana Aparatur	Tersedianya Peralatan di Rumah Dinas Bupati	item	27	27	100% (tercapai)		
			Terpenuhinya Peralatan di Rumah Dinas Wakil Bupati	paket	27	24	88,89 (tidak tercapai)		
			Tersedianya Peralatan di Rumah Dinas Sekretaris Daerah	paket	27	27	100% (tercapai)		
			Terpeliharanya Mess dan Bangunan Rumah Dinas	bulan	12	12	100% (tercapai)		
			Terpeliharanya Gedung Kantor	bulan	12	12	100% (tercapai)		

			Tersedianya Perlengkapan Rumah Dinas	bulan	12	12	100% (tercapai)		
			Terpeliharanya Perlengkapan Gedung Kantor	bulan	12	12	100% (tercapai)		
		Meningkatnya Hubungan dan Layanan Kemasyarakatan oleh KDH/WKDH	Meningkatnya Hubungan KDH/WKDH dengan Ormas/Pelajar/Mahasi swa dan Tokoh Masyarakat	bulan	12	12	100% (tercapai)		
		Cakupan Perangkat Daerah yang menggunakan media sosial sebagai sarana interaksi pemerintah dan masyarakat	Tersedianya Informasi melalui Website dan Pengelolaan Data Elektronik dalam bentuk aplikasi	bulan	12	12	100% (tercapai)		
	Kasubbag Protokol dan Tata Usaha Pimpinan	Meningkatnya Tata Kelola Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	bulan	12	12	100% (tercapai)		
		Meningkatnya Hubungan dan Layanan Kemasyarakatan oleh KDH/WKDH	Meningkatnya Hubungan KDH/WKDH dengan Ormas/Pelajar/Mahasi swa dan Tokoh Masyarakat	bulan	12	12	100% (tercapai)		

3.4. Capaian Tujuan Sekretariat Daerah Tahun 2020

Di dalam Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2016-2021 telah ditetapkan tujuan yang merupakan hasil akhir yang ingin dicapai dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahun. Untuk mengukur keberhasilan pencapaian tujuan tersebut ditetapkan indikator beserta target tahunan serta jangka menengah, dengan realisasi sampai dengan Tahun 2020 sebagai berikut :

Tabel 3.22
Target dan Capaian Tujuan Sekretariat Daerah Kab. Bangka Barat sampai dengan Tahun 2020

No.	TUJUAN	INDIKATOR	Target		Realisasi				Tingkat Capaian (%)	
			2020	2021	2017	2018	2019	2020	2020	s.d. 2021
1.	Menguatkan akuntabilitas kinerja Sekretariat Daerah.	Nilai evaluasi SAKIP Sekretariat Daerah	72,5	73	65,12	65,12	72,06	72,4	99,86	99,18
2.	Meningkatkan sistem tata kelola pemerintahan yang efektif.	1. Nilai LPPD Pemerintah Daerah	3,8	3.80	2,96	3,07	3,3	3,26	85,79	85,79
		2. Survey kepuasan Masyarakat (SKM) atas pelayanan publik	83	85	-	81,10	78,62	80,71	97,24	94,95
Rata-Rata									94,30	93,31

Berdasarkan Tabel 3.16 terlihat bahwa rata-rata tingkat capaian target dari indikator tujuan Sekretariat Daerah adalah 93,31 dengan kata lain > 90 persen sehingga dapat disimpulkan bahwa tujuan Renstra Sekretariat Daerah Tahun 2021 optimis tercapai.

3.5. Realisasi Anggaran

Berdasarkan data realisasi keuangan Tahun 2020, didapatkan bahwa anggaran Sekretariat Daerah sebesar Rp 27.839.812.900,00 terserap sebesar Rp 25.176.093.875,00 atau 80,08 %, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel. 3.23
Realisasi Belanja Sekretariat Daerah Tahun 2020

Belanja	Pagu Dana TA 2020 (Rp)	Realisasi TA 2020 (Rp)	(%)
Tidak Langsung	7.763.100.000,00	7.491.968.701,00	96,51
Langsung	20.076.712.900,00	17.684.125.174,00	88,08
Total	27.839.812.900,00	25.176.093.875,00	90,43

Sedangkan pencapaian kinerja keuangan berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2020 adalah sebagaimana ditampilkan pada Tabel 3.24.

Tabel. 3.24
Realisasi Belanja Langsung Sekretariat Daerah Tahun 2020

Sasaran	Indikator Sasaran	Program / Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Sekretariat Daerah	1. Nilai evaluasi SAKIP Sekretariat Daerah	1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	9.425.357.000	8.278.199.738	87,83
	2. Persentase Temuan Hasil Pemeriksaan yang ditindaklanjuti	2. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	25.900.000	25.900.000	100
		3. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	2.141.900.000	1.742.194.936	81,34
		4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	202.443.000	186.768.000	92,26
		5. Program Peningkatan Disiplin Aparatur	43.580.000	43.580.000	100
2. Meningkatnya kualitas pelaksanaan pemerintahan	1. Nilai LPPD Pemerintah Daerah	1. Program Penguatan dan Penataan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	157.403.500	149.888.000	95,23
		2. Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah / wakil Kepala Daerah	1.704.102.000	1.315.150.100	77,18
		3. Program Pengembangan Data dan informasi	39.870.000,00	39.869.000	99,99 7
		4. Program Pembinaan dan Pengembangan SDM	361.918.400	332.592.900	91,90
		5. Program Pembinaan Kehidupan Beragama	2.067.270.000	1.854.320.000	89,70
		6. Program Kerjasama Pembangunan	48.705.000,00	44.900.000	92,19
		7. Program Penetapan dan Penegasan Batas Wilayah	43.415.000	42.400.000	97,66

2. Meningkatnya kualitas kinerja pemerintah daerah	1. Persentase capaian kinerja pemerintah daerah	1. Program Pengembangan Kebijakan Perekonomian Pembangunan	284.870.000	240.865.000	84,55
	2. Persentase penyerapan anggaran pemerintah daerah	2. Program Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Secara Elektronik	1.277.131.000	1.233.022.500	96,55
	3. Persentase paket pengadaan yang dilaksanakan	3. Program Sarana Informasi Pembangunan Daerah	25.650.000	25.650.000	100
3. Terpenuhinya kualitas tatalaksana dan pelayanan publik pemerintah daerah	1. Survey kepuasan masyarakat (SKM) atas pelayanan publik	1. Program Penataan dan Penguatan Kelembagaan	100.632.000	92.392.000	91,81
		2. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	131.943.000	126.482.000	95,86
	2. Persentase perangkat daerah yang tatalaksananya baik	4. Program Penataan dan Penguatan Ketatalaksanaan	95.726.000	87.526.000	91,43
4. Tersedianya regulasi daerah yang memadai	3. Nilai Evaluasi Kinerja BUMD	5. Program Pembinaan BUMD	200.525.000	172.450.000	86,00
	Persentase regulasi daerah yang ditetapkan sesuai dengan amanat peraturan di atasnya	1. Program Penataan Peraturan Perundang-undangan	1.698.372.000,00	1.649.975.000	97,15
TOTAL			20.076.712.900	17.684.125.174	92,44

Berdasarkan data dari Tabel 3.24 terlihat bahwa rata-rata serapan anggaran Belanja Langsung Setda yang menunjang pencapaian kinerja sasaran adalah 92,44 persen lebih besar dari tahun sebelumnya yaitu 79, 12 persen. Demikian pula jika dibandingkan dengan data rata-rata serapan anggaran Pemerintah Daerah sebesar 90,45 persen, maka serapan anggaran di Sekretariat Daerah Kab. Bangka Barat lebih besar dari pada rata-rata serapan anggaran seluruh Perangkat Daerah.

Lebih baiknya serapan anggaran Tahun 2020 dibandingkan serapan anggaran Tahun 2019 dikarenakan antara lain pengendalian yang dilakukan oleh seluruh Bagian di lingkup Sekretariat Daerah Kab. Bangka Barat.

3.6. Analisis Atas Efisiensi Dalam Penggunaan Sumberdaya

3.6.1. Analisis efisiensi dalam penggunaan anggaran

Analisis efisiensi dalam penggunaan anggaran dicapai melalui Perbandingan persentase rata – rata capaian kinerja sasaran dengan persentase realisasi atau penyerapan anggaran

Analisis efisiensi penggunaan anggaran melalui pembandingan antara persentase rata – rata capaian kinerja sasaran dengan persentase penyerapan anggaran sebagai berikut:

- a. Efisien, jika persentase rata – rata capaian kinerja sasaran mencapai 100% atau lebih dan persentase penyerapan anggaran kurang dari atau sama dengan persentase rata – rata capaian kinerja sasaran.
- b. Cukup efisien, jika persentase rata-rata capaian kinerja sasaran mencapai lebih besar atau sama dengan 80 persen namun di bawah 100 persen dan penyerapan anggaran kurang dari persentase rata – rata capaian kinerja sasaran.
- c. Tidak efisien, jika persentase rata – rata capaian kinerja sasaran kurang dari 100%, dan persentase penyerapan anggaran lebih besar dari persentase rata – rata capaian kinerja sasaran

Hasil analisis efisiensi penggunaan anggaran Sekretariat Daerah dari rencana pembiayaan dalam pencapaian 5 (lima) sasaran strategis dengan 10 (sepuluh) indikator sasaran Tahun 2020 sebesar Rp. 20.076.712.900 dengan realisasi anggaran Rp. 17.684.125.174 atau 92,44 persen untuk mencapai sasaran dengan rata-rata capaian sebesar 89,53 persen, masuk kategori Tidak Efisien sebagaimana ditampilkan pada Tabel 3.25.

Tabel 3.25
Efisiensi Penggunaan Anggaran dalam Pencapaian Sasaran Strategis Sekretariat Daerah Kab. Bangka Barat

Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Tingkat Capaian Kinerja	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Anggaran	Keterangan
1. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Sekretariat Daerah	1.Nilai evaluasi SAKIP Sekretariat Daerah	Nilai	99,86	9.425.357.000	8.278.199.738	87,83	Cukup efisien
	2. Persentase Temuan Hasil Pemeriksaan yang ditindaklanjuti	Persen	100	25.900.000	25.900.000	100	efisien
2. Meningkatnya kualitas pelaksanaan pemerintahan	1. Nilai LPPD Pemerintah Daerah	Nilai	85,79	157.403.500	149.888.000	95,23	Tidak efisien
3. Meningkatnya kualitas kinerja pemerintah daerah	1. Persentase capaian kinerja pemerintah daerah	Persen	95,77	284.870.000	240.865.000	84,55	Cukup efisien
	2. Persentase penyerapan anggaran pemerintah daerah	Persen	96,22	1.277.131.000	1.233.022.500	96,55	Tidak efisien
	3. Persentase paket pengadaan yang dilaksanakan	Persen	100	25.650.000	25.650.000	100	efisien
4. Terpenuhinya kualitas tatalaksana dan pelayanan publik pemerintah daerah	1. Survey kepuasan masyarakat (SKM) atas pelayanan publik	Nilai	80,98	100.632.000	92.392.000	91,81	Tidak efisien
	2. Persentase perangkat daerah yang tatalaksananya baik	Persen	26,67	95.726.000	87.526.000	91,43	Tidak efisien
5. Tersedianya regulasi daerah yang memadai	3. Nilai Evaluasi Kinerja BUMD	Nilai	103,73	200.525.000	172.450.000	86,00	efisien
	Persentase regulasi daerah yang ditetapkan sesuai dengan amanat peraturan diatasnya	Persen	86,73	1.698.372.000	1.649.975.000	97,15	Tidak efisien
	TOTAL	Persen	89,53	20.076.712.900	17.684.125.174	92,44	Tidak efisien

DAFTAR NAMA JABATAN FUNGSIONAL, JABATAN PELAKSANA, JABATAN LAINNYA, KELAS JABATAN DAN PERSEDIAAN PEGAWAI
DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BANGKA BARAT

No.	Nama Jabatan Fungsional, Jabatan Pelaksana, dan Jabatan Lainnya	Unit Organisasi	Kelas Jabatan	Persediaan Pegawai	kebutuhan Pegawai	Keteranga n
1	2	3	4	5	6	7
I	SEKRETARIAT DAERAH					
1	Staf Ahli Bupati Bidang Kemasyarakatan dan SDM	Sekretariat Daerah	13	1	1	
2	Staf Ahli Bupati Bidang Perekonomian dan Pembangunan	Sekretariat Daerah	13	0	1	
3	Staf Ahli Bupati Bidang Hukum dan Politik	Sekretariat Daerah	13	1	1	
	BAGIAN SOSIAL DAN KEMASYARAKATAN					
4	Analisis Budaya Keagamaan	Sub Bagian Agama dan Kebudayaan	7	1	1	
5	Pengadministrasi Umum	Sub Bagian Agama dan Kebudayaan	5	1	1	
6	Analisis Kemasyarakatan	Sub Bagian Kemasyarakatan	7	0	1	
7	Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan	Sub Bagian Kemasyarakatan	7	0	1	
8	Pengelola Bantuan Sosial dan Hibah	Sub Bagian Sosial	6	0	1	
9	Pengelola Data Bantuan Sosial	Sub Bagian Sosial	6	1	1	
	BAGIAN PEMERINTAHAN					
10	Pengadministrasi Rapat	Sub Bagian Pemerintahan Umum dan Ketertiban	5	0	1	
11	Analisis Kerja Sama	Sub Bagian Otonomi Daerah dan Kerjasama	7	1	1	
12	Pengadministrasi Program dan Kerjasama	Sub Bagian Otonomi Daerah dan Kerjasama	5	0	1	
13	Pengelola Penyelenggara Otonomi Daerah	Sub Bagian Otonomi Daerah dan Kerjasama	6	1	1	
14	Analisis Pemerintahan Daerah	Sub Bagian Pemerintahan Umum dan Ketertiban	7	1	1	
15	Pengelola Rencana Pemerintahan Umum	Sub Bagian Pemerintahan Umum dan Ketertiban	6	1	1	
16	Pengadministrasi Batas Wilayah	Sub Bagian Penataan dan Batas Wilayah	5	1	1	

17	Analisis Batas Wilayah	Sub Bagian Peta dan Batas Wilayah	7	0	1	
18	Pengelola Batas Wilayah, Rupabumi dan Paten	Sub Bagian Peta dan Batas Wilayah	6	0	1	
	BAGIAN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN					
19	Analisis Perekonomian	Sub Bagian Pengendalian Kebijakan Perekonomian dan Pembangunan	7	0	1	
20	Analisis Kebijakan Muda	Bagian Perekonomian dan Pembangunan	10	0	1	
21	Analisis Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran	Sub Bagian Pemantauan dan Evaluasi Kebijakan Perekonomian dan Pembangunan	7	0	1	
22	Analisis Program Pembangunan	Sub Bagian Pemantauan dan Evaluasi Kebijakan Perekonomian dan Pembangunan	7	0	1	
23	Pengelola Monitoring dan Evaluasi	Sub Bagian Pemantauan dan Evaluasi Kebijakan Perekonomian dan Pembangunan	6	0	1	
24	Pengelola Pembinaan dan Pengembangan Perekonomian	Sub Bagian Pengendalian Kebijakan Perekonomian dan Pembangunan	6	0	1	
25	Analisis Kebijakan Pertama	Sub Bagian Pengendalian Kebijakan Perekonomian dan Pembangunan	8	1	1	
26	Pengadministrasi Umum	Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan	5	1	1	
27	Analisis Laporan Akuntabilitas Kinerja	Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan	7	0	1	
28	Analisis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan	7	0	1	
29	Pengelola Pelaporan dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan APBD	Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan	6	0	1	
30	Pengelola Bahan Perencanaan	Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan	6	1	1	
	BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA					
31	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Muda	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	9	0	1	
32	Analisis Program Manajemen Pengadaan Barang dan Jasa Pos dan Informatika	Sub Bagian Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	7	0	1	
33	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Pertama	Sub Bagian Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	8	0	1	

34	Pengawas Teknologi Informasi	Sub Bagian Layanan Pengadaan Secara Elektronik	7	1	1	
35	Pengelola Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Sub Bagian Layanan Pengadaan Secara Elektronik	6	1	1	
36	Penyusun Program Sumber Daya Manusia dan Organisasi Pos dan Informatika	Sub Bagian Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	7	1	1	
37	Penyusun Program Manajemen Pengadaan Barang atau Jasa Pos dan Informatika	Sub Bagian Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	6	0	1	
38	Pengadministrasi Umum	Sub Bagian Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	5	1	1	
	BAGIAN HUKUM					
39	Pranata Komputer Muda	Bagian Hukum	9	0	1	
40	Pranata Komputer Pertama	Sub Bagian Pengkajian dan Dokumentasi Hukum	8	1	1	
41	Penelaah Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum	Sub Bagian Pengkajian dan Dokumentasi Hukum	7	0	1	
42	Pengelola Data Informasi Hukum	Sub Bagian Pengkajian dan Dokumentasi Hukum	6	0	1	
43	Penyusun Bahan Bantuan Hukum	Sub Bagian Penyuluhan, Bantuan Hukum dan HAM	7	0	1	
44	Penyusun Bahan Penyuluhan Hukum	Sub Bagian Penyuluhan, Bantuan Hukum dan HAM	7	0	1	
45	Analisis Permasalahan Hukum	Sub Bagian Penyuluhan, Bantuan Hukum dan HAM	7	0	1	
46	Analisis Hukum	Sub Bagian Produk Hukum Daerah	7	1	1	
47	Analisis Produk Hukum	Sub Bagian Produk Hukum Daerah	7	0	1	
48	Penyusun Rancangan Perundang-Undangan	Sub Bagian Produk Hukum Daerah	6	0	1	
49	Pengadministrasi Data Peraturan Perundang - Undangan	Sub Bagian Produk Hukum Daerah	5	1	1	
	BAGIAN UMUM, PERLENGKAPAN DAN PROTOKOL					
50	Bendahara	Sub Bagian Perlengkapan dan Keuangan	7	2	2	
51	Pengelola Perbendaharaan dan Pelayanan	Sub Bagian Perlengkapan dan Keuangan	6	1	1	
52	Verifikator Keuangan	Sub Bagian Perlengkapan dan Keuangan	6	0	1	
53	Pengadministrasi Keuangan	Sub Bagian Perlengkapan dan Keuangan	5	0	1	

54	Pengelola Pemanfaatan Barang Milik Daerah	Sub Bagian Perlengkapan dan Keuangan	6	2	2	
55	Pengadministrasi Teknis Pemeriksaan dan Perawatan Kendaraan Bermotor	Sub Bagian Perlengkapan dan Keuangan	5	1	1	
56	Pengemudi	Sub Bagian Perlengkapan dan Keuangan	3	0	9	
57	Pengadministrasi Keuangan	Sub Bagian Protokol dan Tata Usaha Pimpinan	5	0	2	
58	Pranata Hubungan Masyarakat Terampil	Sub Bagian Protokol dan Tata Usaha Pimpinan	6	1	1	
59	Pranata Acara	Sub Bagian Protokol dan Tata Usaha Pimpinan	6	1	1	
60	Pengadministrasi Umum	Sub Bagian Protokol dan Tata Usaha Pimpinan	5	1	1	
61	Petugas Protokol	Sub Bagian Protokol dan Tata Usaha Pimpinan	5	0	1	
62	Penata Liputan	Sub Bagian Protokol dan Tata Usaha Pimpinan	6	0	1	
63	Penyusun Dokumentasi Kesenian dan Perfilman	Sub Bagian Protokol dan Tata Usaha Pimpinan	7	0	1	
64	Pengelola Dokumentasi	Sub Bagian Protokol dan Tata Usaha Pimpinan	6	1	1	
65	Analisis Kepegawaian Pertama	Sub Bagian Umum dan Rumah Tangga	8	0	1	
66	Pengelola Data Administrasi dan Verifikasi	Sub Bagian Umum dan Rumah Tangga	6	1	1	
67	Analisis Perencanaan	Sub Bagian Umum dan Rumah Tangga	7	0	1	
68	Pengadministrasian Umum	Sub Bagian Umum dan Rumah Tangga	5	0	1	
69	Pramu Kebersihan	Sub Bagian Umum dan Rumah Tangga	1	0	2	
70	Pramu Taman	Sub Bagian Umum dan Rumah Tangga	1	0	2	
71	Pengelola Sarana Prasarana Rumah Tangga Dinas	Sub Bagian Umum dan Rumah Tangga	6	0	1	
72	Teknisi Peralatan dan Mesin	Sub Bagian Umum dan Rumah Tangga	6	0	1	
	BAGIAN ORGANISASI DAN RB					
73	Analisis Jabatan	Sub Bagian Kelembagaan dan Anjab	7	0	1	
74	Analisis Kelembagaan	Sub Bagian Kelembagaan dan Anjab	7	0	1	
75	Pengolah Data	Sub Bagian Kelembagaan dan Anjab	6	0	1	
76	Analisis Kinerja	Sub Bagian Peningkatan Kinerja dan RB	7	1	1	
77	Analisis Laporan Akuntabilitas Kinerja	Sub Bagian Peningkatan Kinerja dan RB	7	0	1	

78	Pengadministrasi Kepegawaian	Sub Bagian Peningkatan Kinerja dan RB	5	0	1	
79	Analisis Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Sub Bagian Tatalaksana dan Pelayanan Publik	7	1	1	
80	Analisis Tata Laksana	Sub Bagian Tatalaksana dan Pelayanan Publik	7	0	1	
81	Pengelola Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara	Sub Bagian Tatalaksana dan Pelayanan Publik	6	0	1	
82	Pengelola Monitoring dan Evaluasi	Sub Bagian Tatalaksana dan Pelayanan Publik	6	0	1	
83	Pengelola Tata Naskah	Sub Bagian Tatalaksana dan Pelayanan Publik	6	0	1	
JUMLAH				33	96	

BAB IV

PENUTUP

Pada bab ini diuraikan kesimpulan atas capaian kinerja organisasi dan saran yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerja. Untuk lebih jelasnya kesimpulan LAKIP Tahun 2020 dan saran untuk dimasa mendatang diuraikan sebagai berikut , yaitu :

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan Laporan Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2020 dapat disimpulkan :

1. Dari 3 (tiga) indikator tujuan, pada Tahun 2020, tidak ada target indikator yang memenuhi target, namun rata-rata tingkat capaian di atas 90 persen, yaitu sebesar 94,30 persen;
2. Dari 4 (empat) Sasaran Indikator Kinerja Utama (IKU) yang dijabarkan kedalam 8 (delapan) Indikator Sasaran, terdapat 2 (dua) indikator yang mencapai target yang ditetapkan,;
3. Dari 5 (lima) sasaran Sekretariat Daerah yang dijabarkan kedalam 10 (sepuluh) indikator sasaran terdapat 3 (tiga) indikator sasaran yang tercapai dan 7 (tujuh) indikator sasaran tidak tercapai.
4. Berdasarkan evaluasi capaian sasaran Tahun 2020 terhadap target akhir Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2016-2021, dari 10 indikator sasaran, sebanyak 3 (tiga) indikator sasaran yang telah tercapai dan 4 (empat) indikator sasaran belum tercapai namun optimis tercapai pada akhir periode Renstra dan 3 (tiga) indikator sasaran belum tercapai serta perlu upaya lebih untuk mencapai target akhir periode Renstra

Dalam rangka pembiayaan pembangunan untuk menunjang pencapaian sasaran strategis daerah, pada Tahun 2020 telah ditetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bangka Barat dengan total anggaran belanja langsung sebesar Rp 20.076.712.900,00 dan terealisasi sebesar Rp 17.684.125.174,00 atau sebesar 88,08 persen, meningkat 7,1 point dari Tahun 2019 yaitu sebesar 80,98 persen.

4.2 Strategi di Masa Datang

Adapun strategi yang akan dilaksanakan dalam pencapaian sasaran strategis Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Bangka Barat kedepan sebagai berikut :

- a. Menggunakan hasil evaluasi terhadap pencapaian Renstra sebagai bahan masukan dalam penyusunan perencanaan pembangunan periode berikutnya;

- b. Meningkatkan kualitas perencanaan Sekretariat Daerah dengan melakukan penguatan terhadap SDM dan data yang akurat dan analisa yang valid;
- c. Meningkatkan koordinasi dengan bagian-bagian lingkup Sekretariat Daerah dan koordinasi Sekretariat Daerah dengan Perangkat Daerah dalam pencapaian sasaran strategis Sekretariat Daerah yang berkaitan dengan Perangkat Daerah;
- d. Meningkatkan pengendalian dan evaluasi terhadap pencapaian target sasaran Sekretariat Daerah secara berkala.